



LPPM 8

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email: lppm@upnyk.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
NOMOR: 89 / UN62.21/LT/IV / 2017

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT**
Jabatan : Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 093/SP2H/LT/DRPM/IV/2017, tanggal 03 April 2017 memberikan tugas kepada :

N a m a	Jabatan Tim
1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si	Ketua
2. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T	Anggota1
3. ARIF RIAN TO BUDI NUGROHO S.T., M.Si.	Anggota2

Untuk melaksanakan Penelitian **Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi** dengan bidang Fokus **Kebencanaan** Tahun Anggaran 2017 dengan judul :

"MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA"

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 182.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jumlah dana belum termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21) sebagaimana rincian terlampir.
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
 - 1) Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 127.750.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 2) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp. 54.750.000,- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di tambah dana tambahan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) sehingga menjadi Rp. 54.750.000 (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan diproses oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan dan catatan harian pelaksanaan penelitian, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .

- 3) Paling lambat tanggal 15 September 2017 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
 - 4) Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
 - 5) Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
 - 6) Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70%, diberikan apabila peneliti telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 4. a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) **SIMLITABMAS**.
 - 1) Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 25 Oktober 2017
 - 2) Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 27 Oktober 2017 (bagi penelitian tahun terakhir)
 - b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk:

Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar yang dijilid "*hard cover*" dan *soft copy* dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah ditulis :

Dibiayai oleh :

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017**

- c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi X.
 - d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta.
 - e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
 - f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **RISTEKDIKTI** sebagai pemberi dana.
 - g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
 - i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:
 - a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 24 – 25 Juli 2017

- b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 21 – 22 Agustus 2017
 - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 11 – 12 Oktober 2017, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 27 Oktober 2017
 6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
 7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
 8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
 9. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan manalaku penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta
 10. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran serta iktikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 07 April 2017

Pemberi Tugas

Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, MT.
Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta

Penerima Tugas :

1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si
2. Dr.EKO TEGUH PARIPURNO M.T
3. ARIF Rianto Budi Nugroho S.T., M.Si.

Tembusan Yth. :

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan
- di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email : lppm@upnyk.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si
NIDN : 0021126008
Pangkat / Golongan : Pembina /IV a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul:

“MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA”

yang diusulkan dalam skema **Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi** untuk tahun anggaran 2017 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, April 2017

Mengetahui
Ketua LPPM

(Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT)
NIP.19581202 199203 1 002

Yang menyatakan,

(Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si)
NIDN. 0021126008

BUPATI KARO

Nomor : 005/0630/BPB/2017
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Undangan Lokakarya

Kabanjahe, 31 Maret 2017

Kepada :

Yth. Daftar Terlampir

di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 252-0/UN62/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal Kerjasama Pembuatan Rencana Kontijensi, dengan ini dipermaklumkan bahwa Tim dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan Lokakarya di Kabupaten Karo.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini Saudara diundang untuk hadir dalam acara Lokakarya dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin s.d Selasa, 3 s.d 4 April 2017

Waktu : 13.30 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Asisten Setda Kab. Karo


Acara : Lokakarya Pembaruan (Updating) Dokumen Rencana Kontijensi Menghadapi Ancaman Letusan Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Narasumber : 1. Prof. Dr. Sari Bahagiarti, M.Sc

2. Dr. Eko Teguh Paripurno, MT

Sebagai bahan panduan terlampir Rencana Kontijensi Menghadapi Ancaman Letusan Gunung Sinabung Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 untuk dapat dipedomani serta setiap peserta yang hadir sangat diharapkan dapat membawa laptop dan data-data terupdate dari dinas/instansi masing-masing terkait dengan rencana kontijensi tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMATA, SH



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email: lppm@upnyk.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
NOMOR: 114 / UN62.21/LT/IV / 2018

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT
Jabatan : Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 084/SP2H/LT/DRPM/2018, tanggal 30 Januari 2018 memberikan tugas kepada :

N a m a	Jabatan Tim
1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si	1. Ketua
2. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T	2. Anggota
3. Ir ARIF RIAN TO BUDI NUGROHO	3. Anggota
4. -	4. Anggota

Untuk melaksanakan Penelitian **Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi** dengan bidang fokus **Kebencanaan** Tahun Anggaran 2018 dengan judul :

**"MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA
BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO,
PROVINSI SUMATERA UTARA**
"

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp.140000000,- (Seratus empat puluh juta rupiah). Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21).
2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
 - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 98000000,-(Sembilan puluh delapan juta rupiah)
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp.42000000,- (Empat puluh dua juta rupiah) akan diproses oleh LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta setelah peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan dan catatan harian pelaksanaan penelitian, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70% .
 - c. Paling lambat tanggal 7 September 2018 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
 - d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti penggunaan dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.

- e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
 - f. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70%, diberikan apabila peneliti telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
4. a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) **SIMLITABMAS**.
- 1) Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 5 Oktober 2018
 - 2) Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 5 Oktober 2018 (bagi penelitian tahun terakhir)
- b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid "*hard cover*" dan *soft copy* dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah ditulis :

Dibiayai oleh :

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018
084/SP2H/LT/DRPM/2018, tanggal 30 Januari 2018**

- c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XI.
 - d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
 - e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
 - f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **RISTEKDIKTI** sebagai pemberi dana.
 - g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
 - i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:
- a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 3 – 4 Juli 2018
 - b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 14 – 15 Agustus 2018
 - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 25 – 26 September 2018, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).

5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 26 Oktober 2018
6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
9. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta
10. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran serta itikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 26 April 2018



Pemberi Tugas

Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, MT.
NIP. 19581202 199203 1 001

Penerima Tugas :

1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si
2. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T
3. Ir ARIF RIAN TO BUDI NUGROHO
4. -

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Tembusan Yth. :

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan
 4. Para Kajur
- di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283
Telp. (0274)486733, Fax. (0274)486400, email : lppm@upnyk.ac.id



SURAT TUGAS

NOMOR : 05 /UN62.21/ KL/III/2018

Berdasarkan Perjanjian Pendanaan Penelitian antara Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor: 084/SP2H/LT/DRPM/2018 tanggal 30 Januari 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Puji Lestari, S.IP.,M.Si	Ketua Peneliti
2	Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T	Anggota
3	Arif Rianto BN, S.T.,M.Si	Anggota

Untuk mengadakan penelitian Unggulan Perguruan Tinggi TA. 2018 dengan judul "*Model Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas Melalui Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara*" pada bulan Maret – September 2018

Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Maret 2018

Kepala LP2M UPNVYK


Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, M.T
NIP. 19581202 199203 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email: lppm@upnyk.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN

NOMOR: 04 / UN62.21/PT/IV / 2019

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT
Jabatan : Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan:

1. Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Nomor: T/140/E3/RA.00/2019 25 Februari 2019 Hal: Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2019
2. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 antara Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 202/SP2H/LT/DRPM/2019, tanggal 11 Maret 2019 memberikan tugas kepada :

N a m a	Jabatan Tim
1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si	1. Ketua
2. Dr. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T	2. Anggota
3. Ir ARIF RIAN TO BUDI NUGROHO	3. Anggota

Untuk melaksanakan Penelitian **Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi tkt: Skala 9** dengan bidang fokus **Kebencanaan** Tahun Anggaran 2019 dengan judul :

**"MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA
BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO,
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp.208238000,- (Dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah dana luaran sebesar Rp.15000000,- (Lima belas juta rupiah). Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21).
2. Dana penelitian disalurkan dalam 1 (satu) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:

- a. Pembayaran sebesar 100% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp.208238000,- (Dua ratus delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah dana luaran sebesar Rp.15000000,- (Lima belas juta rupiah).
 - b. Paling lambat tanggal 9 Agustus 2019 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan dalam bentuk Pdf yang diunggah ke SIMLITABMAS.
 - c. Paling lambat tanggal 2 November 2019 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 100%, Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100% dalam bentuk Pdf yang diunggah ke SIMLITABMAS
 - d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
 - e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
 - f. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran dana penelitian sebesar 100% beserta dana tambahan luaran, diberikan apabila peneliti telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 4. a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS berupa; Catatan harian, dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 2 November 2019.
 - b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid "*hard cover*" dan *soft copy* dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah ditulis:

Dibiayai oleh :

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Kontrak Penelitian TA. 2019
Nomor: 202/SP2H/LT/DRPM/2019, tanggal 11 Maret 2019**

- c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII.
- d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
- e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.

- f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **RISTEKDIKTI** sebagai pemberi dana.
 - g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
 - i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
5. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:
 - a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 14 – 15 Mei 2019
 - b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 10 – 17 Juli 2019
 - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 8 – 9 Oktober 2019, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
 6. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 25 Oktober 2019
 7. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
 8. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
 9. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
 10. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.

11. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa penelitian dengan judul : **MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA** dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran, itikad kurang baik, tidak dapat menyelesaikan penelitian dengan benar, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara dan peneliti bertanggungjawab penuh secara hukum.



Yogyakarta, 04 April 2019

Pemberi Tugas

Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, MT.
NIP. 19581202 199203 1 001

Penerima Tugas :

1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si
2. Dr. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T
3. Ir ARIF RIANTO BUDI NUGROHO



Tembusan Yth. :

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan
 4. Para Kajur
- di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 5
Telp. (0274)486733, Fax. (0274)486400, email : lp2m@upnyk.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 28 /UN62.21/ KL.00/2019

Berdasarkan Surat Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Nomor: 04/UN62.21/PT/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dari Kemenristekdikti.

Sehubungan dengan hal tersebut, atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 1. Dr. Puji Lestari, M.Si | Ketua Peneliti | Komunikasi |
| 2. Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T | Anggota Peneliti | Kebencanaan |
| 3. Ir. Arif Rianto Budi Nugroho, M.T | Asisten Peneliti | Komunikasi |
| 4. Poppy Ruliana | Asisten Peneliti | Komunikasi |
| 5. Rama Kertamukti | Asisten Peneliti | Kebijakan |
| 6. Joao Muni | Asisten Peneliti | Kebencanaan |
| 7. Januario Pereira | | |

Untuk mengadakan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul "*Model Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas Melalui Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara*" pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2019.

Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Mei 2019

Ketua LP2M UPN VYK



Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, M.T

KEPANIT. 19581202 199203 1 001

ISSN 1410-4946 (Print)
ISSN 2502-7883 (Online)



JURNAL ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

VOLUME 21, ISSUE 3, MARET 2018

Psychological Analysis of Jokowi's First 100 Days and *Nawacita* from Text in *Twitter*
Indro Adinugroho, Smitha Sjahputri, Judotens Budiarto, Roby Muhamad 173-187

The Victory of Partai Amanat Nasional (PAN) in Ngada
as the Form of Public Distrust against the Party
Bertolomeus Loji Sua 188-200

Evaluation of the Impact of the Watu Ata Nature Reserve Policy Setting
Hendrikus Hironimus Botha, Didik G. Suharto, Rina Herlina Haryanti 201-214

Democratic Model for Village Economic Resource Management
in Nglanggeran, Gunungkidul
Puthut Indroyono, Hempri Suyatna, Awan Santosa, Istianto Ari Wibowo,
Rindu Sanubari, Mashita Firdaus 215-230

Disaster Risk Reduction Based on Community through a Contingency Plan
for Mount Sinabung
Puji Lestari, Eko Teguh Paripurno, Arif Rianto Budi Nugroho 231-245

Integration and Harmonization Strategy in Multicultural Society at Palu City
Haslinda B. Anriani 246-259

Volume 21	Issue 3	Page 173-259	MARET 2018
Accredited by DIKTI No. 36a/E/KPT/2016			

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

JSP is published by the Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada with its main aim to *spread* critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary social and political issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social and political issues from various perspectives. JSP provides high quality study outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers and decision makers to break down the complexity and dynamics of contemporary sociopolitical changes. Published three times a year, in March, July and November, JSP provides itself as a medium for – also invites- researcher, academic practitioners and intellectuals to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.

Editor in Chief:

Janianton Damanik

Vice Editor in Chief:

Bevaola Kusumasari

Novi Kurnia

Editorial Secretary:

Hardini

Nararia Hastutiningtyas

Dwi Anggara

Website:

jurnal.ugm.ac.id/jsp

Email:

jurnalsopol@ugm.ac.id

Editorial Office:

Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
Sosio Yustisia Street, Bulaksumur Yogyakarta 55281

TABLE OF CONTENTS

Psychological Analysis of Jokowi's First 100 Days and *Nawacita* from Text in *Twitter*
Indro Adinugroho, Smitha Sjahputri, Judotens Budiarto, Roby Muhamad _____ 173

The Victory of Partai Amanat Nasional (PAN) in Ngada as the Form of Public Distrust against the Party
Bertolomeus Loji Sua _____ 188

Evaluation of the Impact of the Watu Ata Nature Reserve Policy Setting
Hendrikus Hironimus Botha, Didik G. Suharto, Rina Herlina Haryanti _____ 201

Democratic Model for Village Economic Resource Management in Nglanggeran, Gunungkidul
Puthut Indroyono, Hempri Suyatna, Awan Santosa, Istianto Ari Wibowo, Rindu Sanubari Mashita Firdaus _____ 215

Disaster Risk Reduction Based on Community through a Contingency Plan for Mount Sinabung
Puji Lestari, Eko Teguh Paripurno, Arif Rianto Budi Nugroho _____ 231

Integration and Harmonization Strategy in Multicultural Society at Palu City
Haslinda B. Anriani _____ 246

Disaster Risk Reduction Based on Community through a Contingency Plan for Mount Sinabung

Puji Lestari*
Eko Teguh Paripurno*
Arif Rianto Budi Nugroho*

Abstract

The eruption of Mount Sinabung in Karo district of North Sumatera has continued on and off since 2010. A contingency plan is needed to reduce the risk of disaster. The purpose of this research is to find a disaster communication model in community-based disaster risk management through Sinabung Eruption Contingency Plan of Karo Regency, North Sumatera Province. This research applies the concept and models of community-based disaster management. The research objectives are to make a disaster risk management model based on the community as a contingency plan for Sinabung. A qualitative method is used by the researchers to finish this paper. This research is held in risk area of Mount Sinabung, Karo, Sumatera Selatan. The object of this research is the ability of government, non-government, and also society as actors of concept and models of community-based disaster management communication. The researchers analyze the program and the competency of the actor concept and the models of community-based disaster management communication. The result of this research is a disaster communication model in community-based disaster risk management through Sinabung Eruption Contingency Plan.

Keywords:

communication; disaster management; Sinabung contingency plan.

Introduction

Indonesia has many volcanoes that are still active and could erupt anytime. One of them is Mount Sinabung located in Karo Regency, North Sumatera Province. It is a stratovolcano and has four active craters. Since its latest eruption about 1,200 years ago, a phreatic eruption occurred on August 27, 2010 (Sutawidjaja et al., 2013). This mountain has a high risk of disaster (Lestari et al., 2016). Since 2010, Sinabung's eruptions have killed tens of thousands of people and damaged residences and infrastructure. We

thought disaster management for disaster risk reduction was needed. The definition of disaster management, according to Carter (Suri et al., 2015), is an applicative science seeking by observation and analysis calamity to systematically increase actions associated with the prevention, reduction, preparation, emergency response, and recovery.

Evaluation of volcanic activity is still tricky at volcanoes after a long-term dormant period (Iguchi et al., 2011). Research on disaster management to disaster risk reduction is necessary, especially with a potential disaster,

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta.
Email: pujilestariupn@gmail.com

like for example the Karo District, North Sumatera eruption phase of Mount Sinabung since it is very vulnerable.

Disaster Management in Indonesia is outlined in Article 1 paragraph (6) of Law No.24 of 2007 (Presiden Republik Indonesia, 2007). It states that the implementation of disaster management is a series of efforts covering the establishment of development policies at risk of disaster, disaster prevention activities, emergency response, and rehabilitation. Article 3 paragraph (1) explains that the principles of disaster management, namely humanity, justice, equality of law and government, balance, harmony, order and legal certainty, togetherness, environmental sustainability, and science and technology. In paragraph (2), the principles of disaster management are quickly and precisely, prioritized.

The objective of disaster management, according to Law No. 24 of 2007 Article 4, is to protect the community from disaster threats. The other objective of disaster management is to harmonize existing legislation, to ensure the implementation of disaster management in a planned, integrated, coordinated and comprehensive manner. Then, respecting local culture, building public and private partnerships and encouraging the spirit of cooperation, solidarity, and generosity and creating peace in the life of the society, nation and state.

The implementation of the Law has been supported by Government Regulation No. 21, on the Implementation of Disaster Management. The essence of disaster management is the coordination before the disaster, during the disaster and after the disaster. The National Disaster Management is expected to coordinate disaster management communication aspects (Presiden Republik Indonesia, 2008).

According to (Astheria, 2016), disaster management is the management of information related to the disaster, message delivery and message reception from the pre-disaster stage,

during the disaster and post-disaster. The role of disaster communication determines the success of the government to provide information for public security and to overcome the disaster. This study contributes that the optimization of disaster communication in an integrated manner is important in disaster management. Related to communication, comprehensive disaster management is an effort to prevent and reduce the risk of disaster to manage production process messages or information about the disaster, the messages and message retrieval of the stage post-disaster (Lestari et al., 2013). This study focuses on disaster communication management through coordination implemented in the review of Sinabung Contingency Plans that resulted in the draft of the updated Sinabung Contingency Plan.

One of the most critical pillars of disaster communication management is Community-Based Disaster Risk Management as a disaster mitigation practice that is institutionalized with more systematic knowledge and concepts. There are some critical elements of community building that are always attached to the understanding of the community. First, the territory or locality (area), or material aspect where a group of individuals lives and fosters their social life. Together with human individuals, this element is critical and a necessary condition for the establishment of a community. The territory becomes the residence of a community. Without a territory, there will never be a community. Second, common ties that make up the social networking constructed by members of the community. In some ways, these social networks help certain individuals to easily find ways of survival (ways to survive). Third, social interaction that is formed among individual members of a community. These three aspects will always appear together to define the characteristics of a community (Nasution, 2005). The community referred to in this study is the region and the people

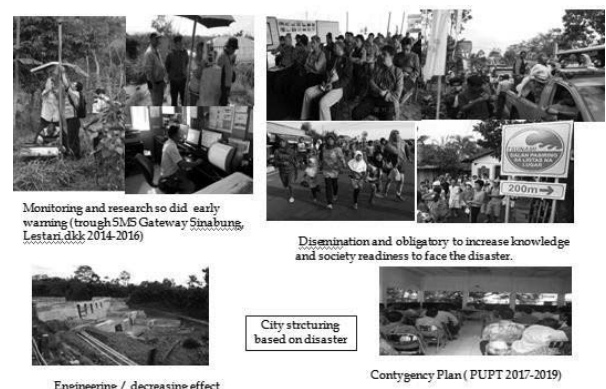
who live in Karo Regency around Sinabung. This community conducts activities through coordination and communication to reduce the impact of the eruption of Mount Sinabung.

According to (Sagala et al., 2014), Community-Based Disaster Risk Management is an approach that encourages grassroots communities to manage disaster risks at the local level. Such efforts require a range of efforts that include self-interpreting the disaster threats and risks it faces, prioritizing disaster mitigation, mitigating and monitoring and evaluating its performance in disaster reduction efforts. Community-Based Disaster Risk Management is also a reflection of the belief that communities have the fullest right to determine the types and ways of disaster management in their context. This is an implication of the ownership of fundamental rights to individuals and communities inherent with the right to exercise that right in the form of an opportunity to determine the direction of life itself. Community-Based Disaster Risk Management provides answers that include several principles such as efficiency because ideally, there will be low transaction costs due to the presence of a maximum local intake and a minimum external intake. Community-Based Disaster Risk Management also responds to sustainability issues because the implementation of Community-Based Disaster Risk Management also ensures that effectiveness, legitimacy, and equity are met. Implementation of Community-Based Disaster Risk Management in Indonesia is still looking for form because so far, it tends to be done for the benefit of the actors and donors. On the other hand, the presence of disasters tends to increase, both in intensity, frequency, magnitude, and distribution. Environmental damage is increasing the Sinabung mountain disaster. This can be seen from the disaster that took dozens of lives and thousands of refugees. In this regard, the search for the Community-Based Disaster Risk Management model

for the threat of Mount Sinabung disaster becomes essential to realize the real community toughness.

Various initiatives to build “resilient villages,” “alert villages,” “harsh villages of disaster,” and “mukim daulat disasters community” are still at the forefront of initiatives of various non-governmental organizations and governments and donors. Post-earthquake disaster in Yogyakarta in 2006 and the eruption of Merapi Volcano in 2006 and 2010, Sinabung 2010 and 2013, Community-Based Disaster Risk Management is considered to be one powerful tool to address disaster risk management issues. Many intervention activities are carried out by both government agencies as well as non-governmental organizations, and even the communities are labeled Community-Based Disaster Risk Management. On the other hand, consciously or not, Community-Based Disaster Risk Management becomes ineffective when perpetrators do not have sufficient competence, while disaster risk reduction is needed as in Sinabung, Kabupaten Karo (Figure 1).

Figure 1.
Roadmap of disaster risk reduction Mount Sinabung



Source: Putra, 2017

This study explores the competence of the perpetrators of Community-Based Disaster Risk Management, with the subject of government agencies, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD, Regional Work Unit) and Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, Regional Disaster Management Agency) of Karo District, non-governmental institutions, and communities in disaster-prone areas of Mount Sinabung. The purpose of this research is to find a disaster communication model in the community-based disaster risk management through Sinabung Eruption Contingency Plan of Karo Regency, North Sumatera Province.

Methods

The research was conducted by a qualitative descriptive method. This method is research to create a picture of the problem about the situation or event. Primary data was collected through observation, interview, and focus group discussion (FGD). FGD is a common approach for data collection in qualitative research projects. The primary characteristic of this method is to use interactive data resulting from discussion among participants. The primary strength of the FGD method is that it can provide rich data, more information, and valuable insight that can not be discovered through other methods (Afianti, 2008).

An FGD was held on 3 and 4 April 2017 followed by in-depth interviews. FGD participants are communities related to disaster management, i.e., BPBD, Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas, Development and Welfare Community Protection) Service Office in Tanah Karo, the Social Service Office, the Education Office, the Health Office, the Environment Agency. Then, the ministry of communications and information, the Agriculture Office, the Fisheries Office, the Public Works Department, Transportation, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP, Public Order Enforcers), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda, Regional Development Planning Board), Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD, Income Financial Management Agency and Local Assets). Also Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana

Geologi (PVMBG, Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation) Polisi Resort (Polres, Police Resort), Komando Distrik Militer (Kodim, Military Command District), NGO Representative, Representative of Moderamen, Sekber, MUI, Representative of volunteers, Bank Sumatera Utara, Sub-district of Naman Teran, Tiganderket, and Umbrella. The number of FGD participants and the Renabung Sinabung review workshop included 40 people.

Data collected through FGD includes 1) Experiences ever conducted by participants in various disaster management programs of Mount Sinabung 2013. 2) Constraints experienced during disaster management. 3) Responses on disaster management of Mount Sinabung in 2013. 4) Feedback on disaster management model for the mitigation of the Sinabung disaster. 5) Material and data compilation for the contingency plan for Sinabung disaster mitigation, the locations affected by the disaster, the location of the refugees, the number and characteristics of the affected population, the access of the population to get assistance, the duration of assistance needed and the Information and Public Diplomacy (IDP) profiles the total needs.

A descriptive-qualitative technique analyzed the collected data. First of all, the data is presented in the data displays and then categorized. The next stage is to make interpretations and conclusions of research results. From the drawing of the conclusions, we get an overview of communication models of disaster risk reduction based on the community through a contingency plan.

The community referred to in this matter is the community engaged in making the contingency plan, which consisted of BPBD and Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG, Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation). Also Polisi Resort (Polres, Police Resort), Komando Distrik Militer (Kodim, Military Command District), Head of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD,

Table 1.
Activities and the Role of Actors

	Activity	Actors	Actors	Actors	Actors	Actors	Actors
1	Condition observation of volcano	PVMBG					
2	Sosialization the condition of volcano	PVMBG	Regent	BPBD			Radio/ TV
3	Determination of status the volcano	PVMBG					
4	Sosialization the condition of volcano	PVMBG					
5	Received status of the volcano		Regent	BPBD			
6	Coordination status of the volcano		Regent	BPBD	TNI-Polri-SKPD		
7	Sosialization status of the volcano		Regent	BPBD	TNI-Polri-SKPD	Community organization	Radio/ TV
8	Sosialization response of the volcano			BPBD	TNI-Polri-SKPD	Community organization	
9	Evaluation the volcano			BPBD	TNI-Polri-SKPD	Community organization	

Source: Lestari et al., 2014:181

Regional Work Unit), community organization, and Media. For more details of the researchers present, the table of activities and the role of the actor's contingency plan, see below:

Results

According to Government Regulation No. 21 the Year 2008 on the Implementation of Disaster Management, every single place has to own its contingency plan, especially the prone areas. Karo is one of the areas disaster-prone. This is why a contingency plan is indispensable in this area.

The contingency plan of Mount Sinabung eruption has not been well implemented. There is no contingency plan that is used as a guide in disaster management eruption Sinabung because no one knows that they have a contingency plan. The search results of the investigators found Sinabung eruption

contingency plan made by Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, National Disaster Management Agency) center in 2014. The documents were kept in central BNPB, and the documents were not found in Karo District. Reasons for not finding the document involve the turn of leadership in the Regional Disaster Management Agency (BPBD). This research found a new format of communication models of disaster risk reduction, which was based on the community through contingency plan.

According to interviews in 2014 until 2018 with Chief Executive of BPBD Karo and Head of Preparedness Division, the Karo District Government, notably BPBD, has no contingency plan document. The interviewees state the same answer: to overcome the Sinabung disaster, they use the Action Plan document, or what is known as the Operation Plan. There is no principle difference between

the Contingency Plan and the Plan of Operation that was made by BPBD, except for the preparation time only. Contingency plans are prepared ahead of and before a disaster, so the plan is based on assumptions and scenarios. While the Operation Plan is prepared at the time the disaster happened so that the plan is arranged by real circumstances, the operating plan is prepared by adjusting the type of activities and resources contained in the contingency plan, based on the real needs of the type of disaster that has occurred.

Based on the information, the researchers tried to find information to BNPB Center; the result was the Contingency Plan eruption of Mount Sinabung in 2014. Researchers confirm to BPBD Karo District through the chief executor, secretary, and head of preparedness about the existence of documents that make up Contingency Plans. The result is they do not understand the document because of the change of officials in the Regional Disaster Management Agency (BPBD). Considering there is a document of contingency plan from the Regional Disaster Management Agency (BPBD), this research program is in the form of updating contingency plan data that has been made by BNPB 2014. The updating of this data is possible so that the planning can be close to the facts in the field. Data updating is based on a guidebook for the preparation of contingency plans issued by the central BNPB, including activities in the framework of this follow-up plan, which are listed in the table containing the stages and actors or sectors as well as the timing of the activities. The contingency plans update model found in this study.

BNPB always makes the contingency plan, but, the contingency plan is developed without involving community or people. Based on the results of the interview in 2015 – 2017 to Martin Sitepu (chief executive BPBD 2017), Matius Sembiring (chief executive BPBD 2016), Subur Tarigan Tambun (chief executive BPBD 2015). Then, Hasym Purba

(head section of preparedness 2017), Rani Barus (staff preparedness BPBD), Johnson Tarigan (secretary BPBD 2014 - 2016), contingency plan made by BNPB were not know by BPBD and regional governments. These researchers wanted to renew the plan contingency which had previously been made by BNPB with a top-down system.

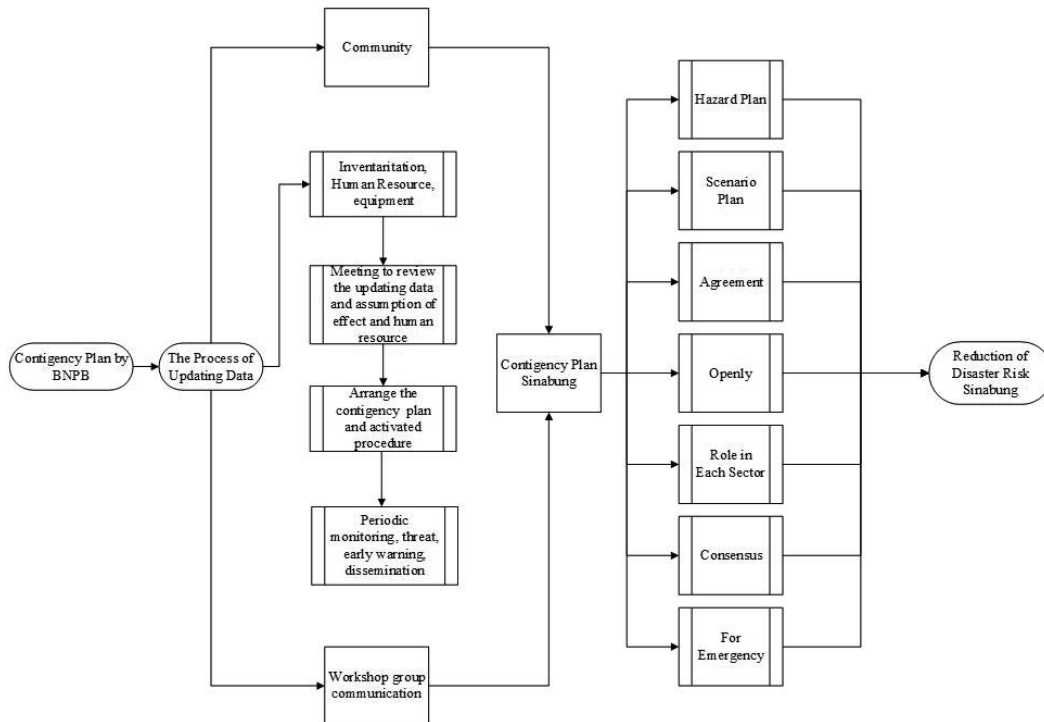
In this study, researchers who conducted the renewal of the planned contingency had previously been arranged by BNPB. The renewal is the community involvement in making the contingency plan. The following are models of communication disaster in disaster risk reduction community-based through a contingency.

The process of updating the Contingency Plan documents involves communities both at the government and community levels around Sinabung as mentioned in the research method. The process first includes inventory and maintenance of availability and readiness of resources, facilities, and infrastructure in each area done periodically. Second, periodic meetings for review to update data and assumptions of disaster impact or projected resource needs. Third, establish fixed procedures that can support the implementation/activation of contingency plans that have been prepared. Fourth, conduct periodic monitoring of threats and early warning and dissemination.

In updating the contingency plan document, the researcher conducts an inventory of data related to the number of refugees, the necessary infrastructure, the resources to be prepared, the responsible personnel, the prepared shelters, and various matters related to the eruption disaster of Sinabung. The data has been written in the document Sinabung contingency plan results of data updating.

One thing to note is that in principle, the preparation of contingency plans, other than those jointly prepared by all stakeholders, also included preparing scenarios and conducting a needs analysis. There was an increase of

Figure 2.
**Communication Models of Disaster Risk Reduction Based on
 Community through Contingency Plan**



Source: Researcher's Data 2017

interaction in the network by arranging such mechanisms and enhancements of actors' capacity (Sagala et al., 2014). Once the needs are calculated in detail, it is determined who the perpetrators are, and do not forget to make an assessment of resources owned by the perpetrator or stakeholders. From the needs and availability of these resources will be known gaps that will be met from various sources that prioritize local and surrounding resources.

Contingency plans are prepared jointly by various parties/elements/components of society. This is intended as an effort of preparedness by all parties because disaster management is a standard affair among government, business entities, and communities where the government is the primary responsibility. Each of the parties or actors may play an active role according to their competence,

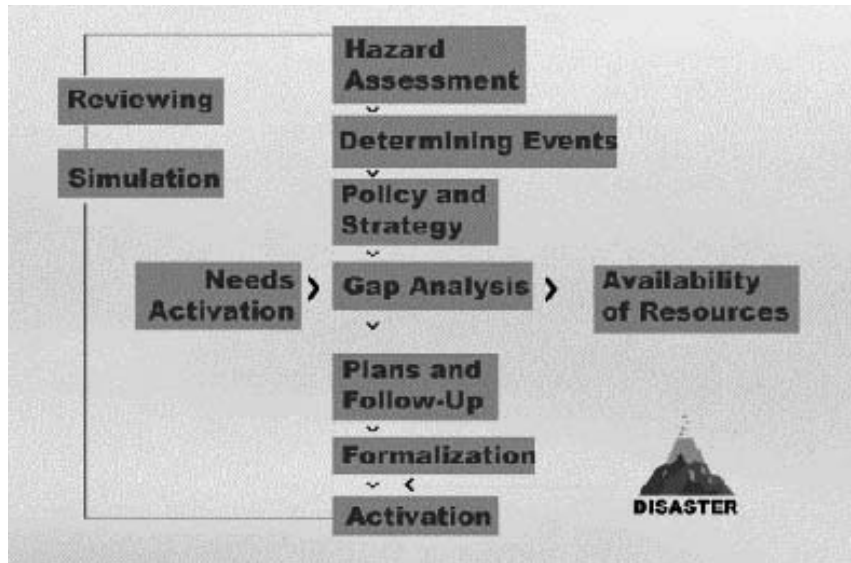
expertise, ability, and authority and contribute or use existing resources within the scope of their powers or authorities. Preparation of a contingency plan is preceded by a coordinated meeting, followed by a meeting or workshop. Stages of preparation of contingency plans start preparation until implementation can be seen in Figure 3.

Hazard assessment is done through the identification of threat types and weighing threats.

- Identify the types of disaster threats using records data/history of disaster events.
- Weighing/scoring of threats/hazards of several types of threats in a district/city and assessing each one.

The development of impact scenarios explains the impact assumptions on life aspects of a disaster event, especially on the community/

Figure 3.
Compilation of Contingency Plans



Source: Tatas, I Putu Artama Wiguna, Machus, Tridani Widyastuti, 2015

population, taking into consideration the vulnerability and local capacity of the affected communities, including community awareness of risks, preparedness, and availability of resources in disaster management. As a result of the Sinabung eruption disaster, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG, Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation) recommended that the population within a radius of 10 Km from the crater be evacuated. The community evacuated using transportation owned by citizens and government that were prepared since the alert status. The evacuation was done from the gathering place in the village which then used the prepared truck to the evacuated shelters. According to the data, there are as many as 40 evacuation areas.

1. The assumption of the number who died, were wounded, disappeared, evacuated, and moved is as follows:
 - a. The number of villages affected by the disaster within a radius of 10 km in 53 villages, with a total population of 57,879 inhabitants.

- b. The assumption of population impact involved 12 dead, 16 lost, moved as many as 2509 were moved, 55,341 displaced people, 55 with severe injuries, 165 with moderate wounds, 553 with minor injuries, and 54,275 non-care people.
2. The impact of the eruption of Mount Sinabung in the form of ash rain resulted in flight disruption at Kuala Namu Airport in Medan City.
3. The road from Medan to Berastagi, Kabanjahe and Aceh Province is very busy road lane and will be hampered by the closing of the road for several hours to evacuate people from the affected villages to evacuation sites, as well as distribution activities of emergency assistance and disaster relief.
4. With experience, the length of eruption of Mount Sinabung and displacement is more than two months. It will disturb the learning and teaching process in affected schools.
5. Impacts on the livestock sector include cattle, buffalo, goats, horses and pigs.

The Determination of Policy and Strategy

The emergency handling policy is intended to guide the relevant sectors to act/implement emergency response activities. The policy is binding because in emergency management, there are treaties that must be obeyed by all parties. Examples of policies are (1) determining the time of emergency response to be carried out (e.g., for 14 days), (2) free care/treatment services for disaster victims.

Emergency management strategies are implemented by each sector according to the nature of sector tasks. This strategy is aimed at the effectiveness of policy implementation. For example, from the policy of “free care/treatment service for the victim” can be formulated strategy “appointing government hospital/private that serve as the referral hospital.”

Sectoral Planning

The first step in sectoral planning is identification activities. All activities for handling urgent things have to be identified so the problem is tackled and completed. There are no activities that overlap and no vital activities who were left behind. Those responsible for implementation plan drafting contingency joined in sector (for example: management and coordination, evacuation, food and non-food, health, transportation, infrastructure). About the sector, the number and the nomenclature is determined by actors contingency plan drafting. There was no stipulation defined in determining the number of and naming to sectors.

- **Sector situation**
The situation was an image of the worst condition during the incident intended to anticipate the level of difficulty in handling the emergency.
- **Sector target**
Intended as goals to achieve in handling of emergency so those of the community or

the victims can be treated to the fullest.

- **Sector activity**
Is that the was conducted during emergency to ensure that the the joined sektor could be actively sector. Sector activities triggered by situation sector during the incident disaster.
- **Sector’s actor identification**
The emergency management sectors were derived from a number of elements, such as good government and non-government, including members of the community broad.
- **Implementation time activities**
The implementation time activity by sector is before the natural disaster, for a moment after the disasters and after as needed.

The local government of Karo Regency has set a 14-days Emergency Response Status based on warnings issued by the Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PVMBG). The length of the emergency response period will be evaluated based on escalation of a disaster event or a recommendation from Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PVMBG). Where necessary, the emergency response period may be extended. In response to the establishment of emergency response status, the Bupati shall appoint an emergency response commander. The emergency commander will be given a decision letter and authority to perform emergency handling according to regulation. The next post will be established at the Office District Kabanjahe with the organizational structure as follows.

Volcanology and Geological Hazard Mitigation says the population within a radius of 10 Km from the crater must evacuate. The community evacuates using transportation owned by citizens and government that have been prepared for the status of “SIAGA.”

To coordinate and control the implementation of emergency response, field committees were established in all

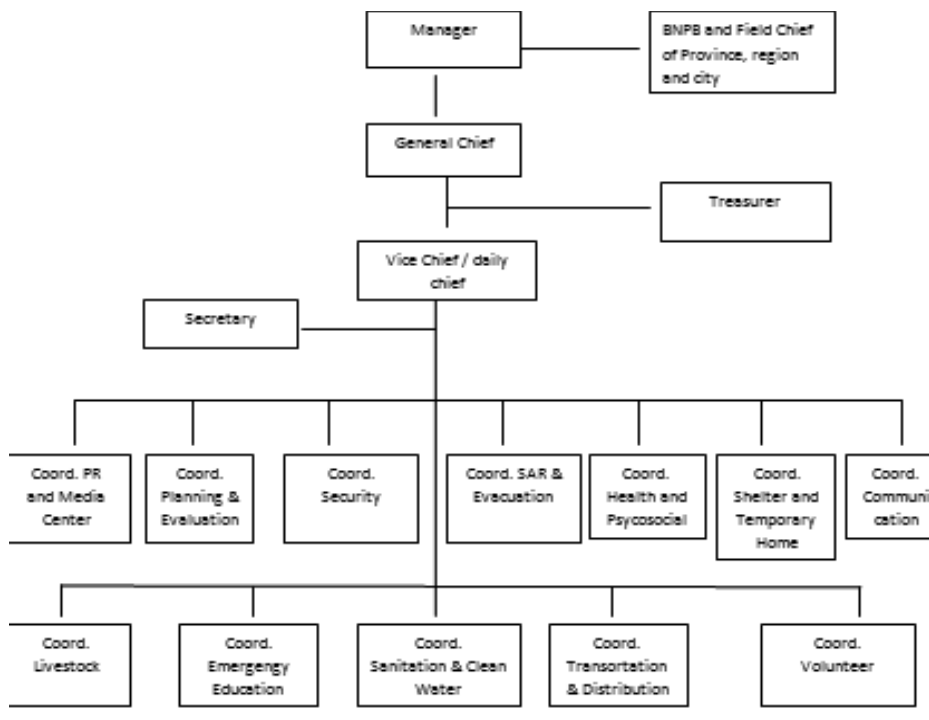
the evacuation sites, being one with health post, public kitchen, emergency education, field logistic warehouse, and security. The evacuation center was spread over 40 refugee districts in Berastagi sub-district, Kabanjahe, Munte, and Tigabinanga, in detail on the table. Support from the central level of the National Disaster Mitigation Agency (BNPB), relevant Ministries/Agencies, Provincial-level support, and other districts/municipalities, support assisting organizations of emergency response organizations in field implementation.

Disaster Risk Reduction Policy has a goal to improve disaster preparedness and to keep development activities from increasing the vulnerability of communities to disaster threats. Contingency planning (as well as other types of plans in disaster management) can be structured at the community level. This is an effort to accelerate capacity building at the community level to manage and mitigate disaster risks. Moreover, the territory of NKRI is

so vast that it is impossible for the government to handle itself. In general, government plays essential political, economic, cultural, and social roles in risk governance systems that include resource assurance, technical support, and disaster risk management (Shi, 2012). Therefore, community empowerment is needed by building the capacity of people in disaster-prone areas that are at high risk, for them to be resilient to disaster. Communities are the first to deal with disaster risks, so they must be able to cope.

This model is the process of updating the data of contingency plan to reduce the impact of the eruption of Mount Sinabung especially during the emergency response in the form of Contingency Plan document (Triutomo et al., 2011). The contingency plan becomes a document of Karo District Government that is endorsed or signed by the authorized official. The Regent of Karo has become an official document (regional document) and is

Figure 4.
Organization Structure of Emergency Respond Comand



Source: Researcher's Data 2017

ready to be implemented into an Emergency Response Operation Plan (through damage information and the need for results from fast study activities) when disaster strikes. The contingency plan will also be submitted to the legislature for political commitment, support and budget allocation. At this stage of the study, Contingency Plan products have not yet obtained formal approval as the pilot stage or new post-rehearsal will be conducted in second-year research (2018).

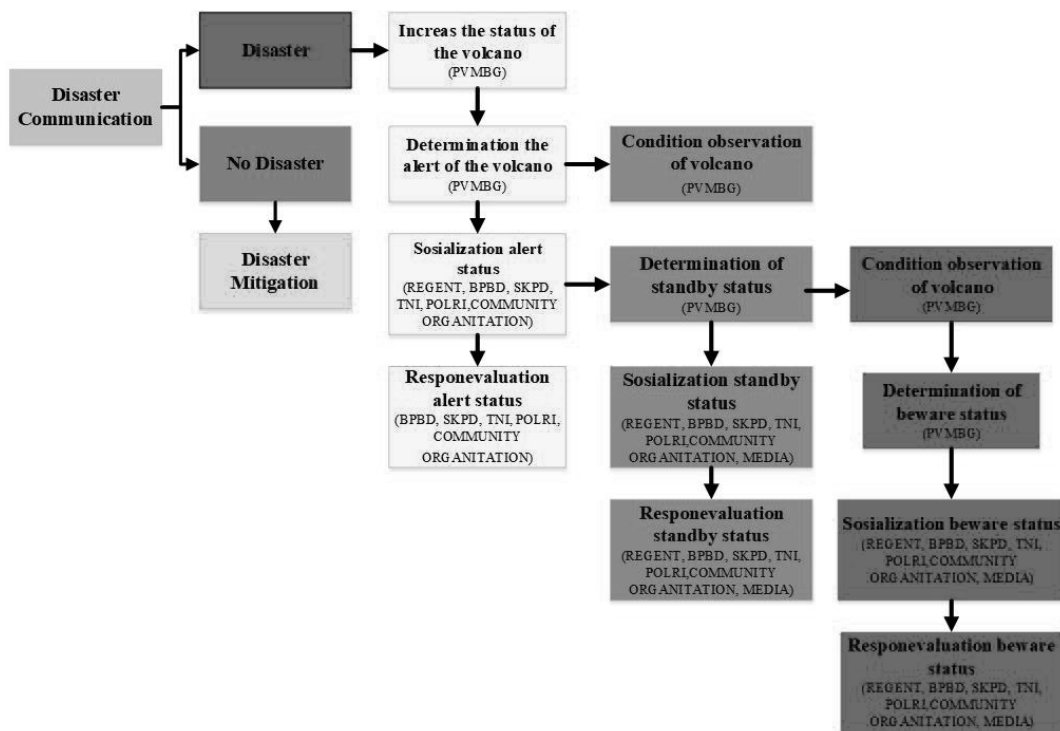
All contingency plans are updated with the team with all Head of Region Working Units (SKPD) of Karo District along with mass organizations and affected communities, according to the latest data. The temporary draft has been requested by The Regional Disaster Management Agency (BPBD). Karo through Rani Barus's brother in June 2017. Rani Barus is a staff preparedness of The Regional Disaster Management Agency (BPBD). Hopefully, this draft can be completed at a later stage and refined to be one of the Sinabung eruption risk

reduction policies in Karo Regency of North Sumatera.

To make the updating happen, the researcher held a workshop to submit a person from every sector. In that workshop, all the participants should be more proactive in completing data of Contingency Plan Sinabung which will become the reference in case of significant disaster related to the eruption of Sinabung. The researchers make a chart of activity and role of actors implementing if disaster happens. The chart is below.

Research findings will be reform documents of the contingency plan for the eruption of Sinabung to give a reference in planning to face disasters in disaster risk reduction. The contribution of research findings this provides eases the tools on the parties or agencies, especially North Karo regency, to reduce the impact of disaster risk in traffic agents. Cross-sectors and cross functions are integrated based on assumptions and deals produced. Having a document contingency

Figure 5.
Activity and Role of Actors



Source: Researcher Data 2017

plan means regional governments have implemented the message of the act of number twenty-four 2007 and government regulation No. 21/2008 on disaster reduction.

Discussion

Each local government, especially in disaster-prone volcano areas, have document contingency plans, such as Daerah Istimewa Yogyakarta, Klaten and Magelang Central Java have created a planned contingency with the disaster center of Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Due to the unknown previous contingency plan, community thinks they need that contingency plan. It makes the researcher, BNPB, and BPBD to be the facilitator in making the new contingency plan which is community-based. There was the communication model to make an updating data for the new based-community contingency plan. Chart five below explains how the communication model is to create a new contingency plan.

Based on models of communication, one can conclude that any element involved having the role of each. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG, Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation) have an important role in providing information on the status of Sinabung Volcano. Information on related mountain status was collected of postal officials observer Sinabung volcano. The observer then will continue information to the head of the region (regent), BNPB, BPBD, and media. After information delivered to the regent, BNPB, BPBD the media, then broadcast to the community.

BNPB has an important role as the representative of the central government that had the task of coordinating various matters disaster management between the government of the central and local government. BPBD having the role of the chief executive in the event of the disaster should have the task of coordinating all the elements that exist. A media that is involved in a contingency plan is a whole media from all

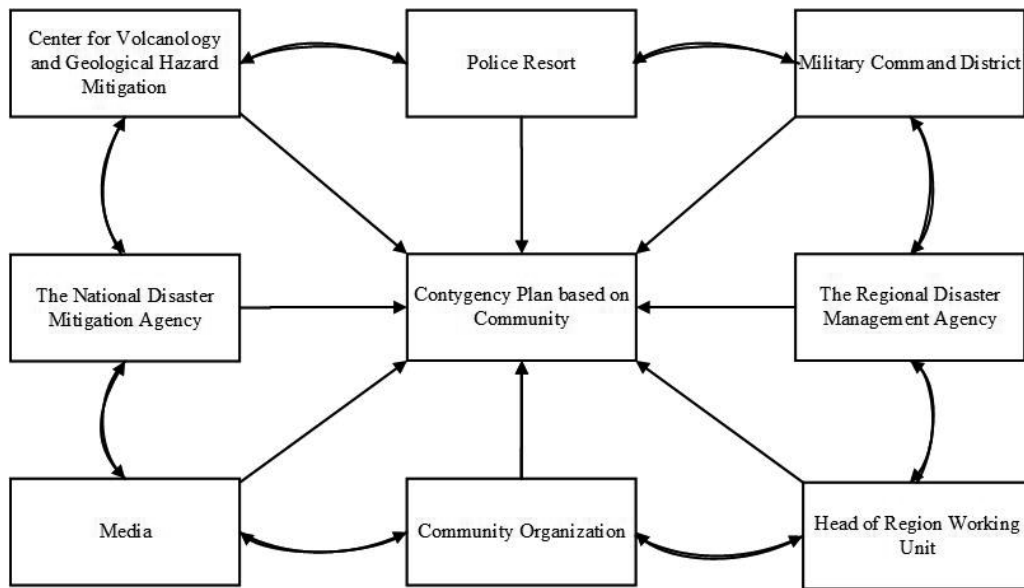
the major platforms: radio, the printed media, television based on community and mainstream media. Not only that, media centers from the agency had yet to receive anything from the Communication and Information Department, which also has a role in delivering trusted information accurately to the community.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD, Regional Work Unit) comprising all the relevant offices (Education Department, Health Department, social Department, the Environment Department, Forestry Department, energy and mineral resources Department, of public works Department, etc) coordinated by the Regent of great political pressure to implement the role of in accordance with the divine stewardship, according to their role. Komando Distrik Militer (Kodim, Military Command District) has many roles coordinate to make a statement on to mobilize the assistance in the form of evacuation and the distribution of assistance. The Polisi Resort (Polres, Police Resort) have a role to coordinate security and traffic at the time of the evacuation.

Civil society organizations consisting of Tagana (disaster preparedness community), the church community, and the mosque community have an important role assisting all the evacuation processes until the provision of the evacuation center. The community played a role in actively participating in the whole process of evacuation by instructions from local authorities. They are expected to create conditions for the community.

Disaster management efforts communication can be done among others with the management of disaster risk based the community as calamity mitigation practices that instituted the reign of knowledge and the concept of a more systematic approach. Community-Based Disaster Risk Management is a reflection of the belief that the community has the right entirely to determines the types and the manner of disaster management in the context

Figure 6
Communication Model to Create a New Community-based Contingency Plan



Source: Researchers Data, 2017

of them. The ownership of the fundamental rights of individuals on the person and the community (the community) that sticks with the right to exercising the right it in the form of a chance to determine the direction of life alone (self-determination). The importance of community action – for disaster risk reduction, for post-disaster rebuilding and climate change adaptation (Satterthwaite, 2011).

Community-Based Disaster Risk Management gives you the answers includes some principle as efficiency available because low transaction cost is done because there are local intake maximum and minimum external intake. Community-Based Disaster Risk Management because of the implementation of the matter with sustainability issue as Community-Based Disaster Risk Management also ensures the effectiveness of, the legitimacy of (participation), and equality (equity) could not be fulfilled. All the community can give that owned voluntarily. Management will arrange by the communities themselves in accordance with local knowledge.

After models of communication community based disaster were described, the result of the formation of that model was a kontinjensi eruption plan. Preparation of contingency plans may be undertaken through prior training activities, or through other forums such as coordination meetings, followed by meetings or workshops, or other forms of activities. The formulation of a contingency plan must be done through preparation and implementation.

The preparation of activities include the provision of a map districts provincial, data “districts in figures,” data about the supply of resources of the respective sectors/the office’s organization/and information from various sources that can be accounted for technically.

In the implementation stage, their activities of contingency plan drafting, which began in risk assessment, preceded by hazard assessments and determination of the danger to determine one type of a threat or disaster expected to occur (which became the priority).

The implementation of disaster risk management based on community should help reduce the risk of disaster in Indonesia. The community-based approach also corrected the defects of the top-down approach in development planning and disaster management, which failed to address local needs, ignored the potential of indigenous resources and capacities, and may have even increased people's vulnerabilities (Victoria, 2002). The environmental damage and behavior of the community improved. This can be seen from the events that feed on dozens of deaths and thousands of refugees fleeing. The implementation of a model Community-Based Disaster Risk Management to reduce disaster around Mount Sinabung is of importance to realize the communities that actually are tough. The government is responsible for land-related disaster risk reduction, but the community is more responsible for those who are vulnerable to a dangerous eruption phase of the volcano.

Conclusion

Once a contingency plan has been drawn up on the basis of a community, the community becomes ready to take part in disaster risk reduction. Disaster Risk Reduction Policy has a goal to improve disaster preparedness and to keep development activities from increasing the vulnerability of the communities to disaster threats. Contingency planning (as well as other types of plans in disaster management) can be structured at the community level. If it formed by the government and the community; it makes both sides understand each other if disaster happens. This is an effort to accelerate capacity building at the community level to manage and mitigate disaster risks. Moreover, the territory of NKRI is so wide that it is impossible for the government to handle itself. Therefore, community empowerment is needed by building the capacity of people in disaster-prone areas that are at high risk in order for them to be resilient to disaster. Communities

are the first to deal with disaster risks, so they must be able to cope.

Acknowledgement

We would like to thank all parties involved in the preparation of the document of contingency plan for the eruption of Mount Sinabung, especially DRPM Kemristekdikti, which funded this research through the 2017 Higher Education Research Grant (PUPT). Also research Institute and Community Service (LPPM) of National Development University Veterans of Yogyakarta, BupatiKaro, Regional Secretary, Assistant Regent, Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Karo Regency along with a team of Local Government Work Units (SKPD), NGOs, Volcanology and Geological Disaster Mitigation Center (PVMBG), Sinabung Observation Post Officer, and participants of the workshop of Contextual Renewal of Sinabung 2017 Plan.

References

- Afianti, Y. (2008). Focus group discussion sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif. *Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62.
- Asteria, D. (2016). Optimalisasi komunikasi bencana di media massa sebagai pendukung manajemen bencana. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(1), 1-11.
- Iguchi, M., Ishihara, K., Surono, & Hendrasto, M. (2011). *Learn from 2010 Eruptions at Merapi and Sinabung Volcanoes in Indonesia* (54 B ed., pp. 185-194). Kyoto: Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University.
- Lestari, P., Kusumayudha, S., Paripurno, E., & Jayadianti, H. (2016). Environmental communication model for disaster mitigation of Mount Sinabung Eruption Karo Regency of North Sumatera. *iNFORMATION An International Interdisciplinary Journal*, 19(9B), 4265-4269. Retrieved from <http://eprints>.

- upnyk.ac.id/14491/1/Information%20Journal.pdf
- Lestari, P., Sembiring, I. D., Prabowo, A., Wibawa, A., & Hendariningrum, R. (2013). Manajemen komunikasi bencana Merapi 2010 pada saat tanggap darurat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 173–197. doi: 10.24002/jik.v10i2.350
- Nasution, M. S. (2005). *Penanggulangan bencana berbasis komunitas: studi kasus kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas daerah rawan bencana alam tanah longsor di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat*. (Unpublished master's thesis). doi: doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). PP RI No 21 Tahun 2008. *Peraturan Pemerintah*. Jakarta.
- Putra, A. (2017). *Analisis bahaya Gunung Sinabung*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi & UPN Veteran Yogyakarta. Retrieved from http://eprints.upnyk.ac.id/13911/1/ANALISIS_BAHAYA_GUNUNG_SINABUNG_APRIL_2017.pdf
- Sagala, S. A., Situngkir, F., & Wimbardana, R. (2013). Interaksi Aktor dalam rekonstruksi rumah pasca bencana gempa bumi. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(2), 217. doi: 10.29313/mimbar.v29i2.397.
- Satterthwaite, D. (2011). Editorial: Why is community action needed for disaster risk reduction and climate change adaptation? *Environment and Urbanization*, 23(2), 339–349. <https://doi.org/10.1177/0956247811420009>
- Shi, P. (2012). On the role of government in integrated disaster risk governance—Based on practices in China. *International Journal of Disaster Risk Science*, 3(3), 139–146. doi: <https://doi.org/10.1007/s13753-012-0014-2>
- Suri, N. K., & Utara, U. S. (2015). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo dalam upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. *Perspektif*, 8(1), 456–477.
- Sutawidjaja, I. S. Prambada, O., & Siregar, D. A. (2013). The August 2010 Phreatic Eruption of Mount Sinabung, North Sumatra Letusan Freatik Gunungapi Sinabung Agustus 2010, Sumatra Utara. *Indonesian Journal on Geoscience*, 8(1), 55–61. doi: 10.17014/ijog.v8i1.155
- Tatas, T., Wiguna I. P., Machus, M., Widyastuti, T. D., & Rohman, M. A. (2015). Rencana kontinjensi untuk tanah longsor. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil*, 13(2), 27-40.
- Triutomo, S., Widjaja, B. W., Siswanto, B. P., & Yohannes, K. (2011). *Panduan perencanaan kontinjensi menghadapi bencana*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD).
- Victoria, L. P. (2002). Community based approaches to disaster mitigation. *Regional workshop on best practices in disaster mitigation*, 270–314. Retrieved from <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN009661.pdf>
- Wu, T., Takara, K., & Yamashiki, Y. (2012). The vulnerability variation from government roles in disaster risk reduction plans for sediment disasters in Taiwan. *Hydrological Processes*, 26(16), 2421–2430. <https://doi.org/10.1002/hyp.9346>

Index of Author Volume 21, Issue 3

Adinugroho, Indro 173	Nugroho, Arif Rianto Budi 231
Anriani, Haslinda B. 246	Paripurno, Eko Teguh 231
Botha, Hendrikus Hironimus 201	Santosa, Awan 215
Budiarto, Judotens 173	Sjahputri, Smitha 173
Firdaus, Rindu Sanubari Mashita 215	Sua, Bertolomeus Loji 188
Haryanti, Rina Herlina 201	Suharto, Didik G. 201
Indroyono, Puthut 215	Suyatna, Hempri 215
Lestari, Puji 231	Wibowo, Istianto Ari 215
Muhamad, Roby 173	

Index of Subject Volume 21, Issue 3

democratic model 215	natural resources 201
disaster management 231	<i>nawacita</i> 173
economic democracy 215	policy setting 201
effectiveness 201	public distrust 188
harmonization 246	public response 173
integration 246	responsiveness 201
Jokowi's first 100 days 173	Sinabung contingency plan 231
multicultural 246	

About Author

Adinugroho, Indro, is a lecturer and researcher from Faculty of Psychology, Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya. His interest covers several areas in politics and democracy in the looking glass of behavioral science. He earned his Master Degree in Social Psychology (M.Si) from University of Indonesia in 2015. He has published several articles regarding his research in the area of human behavior in Indonesian democracy, such as Analyzing SBY's lyrics (2016); monitoring public response towards political issues regarding Jokowi (2017) and analysis on how moral judgment and emotion plays a role in politics (2017). Besides acting as a researcher, He also served as Head of Strategic Planning Unit in Unika Atma Jaya from 2016 to present.

Anriani, Haslinda B., is an active lecturer at the Department of Sociology, Tadulako Palu University. In addition to teaching, she is also an active researcher. Her last research is on "Social Harmony in Multiethnic Society 2017" funded by Ristekdikti. She has presented her main idea about conflict and social integration in some international sociological conference. She has also produced several writings in the form of books and academic journals, among them are: Constructing Social Harmony in Plural Society (2017), Pergolakan Nelayan di Teluk Palu (2018), Revitalizing the local wisdom of 'Nosarara Nosabatutu' in Social Participation (2018).

Botha, Hendrikus Hironimus, is a graduate student of public administration at Sebelas Maret University Surakarta and has been graduated on 29 January 2018. His government science degree (S.IP) was obtained in 2014 at the catholic university Widya Mandira Kupang. His interest in social issues has been poured in his thesis for government science degree entitled 'Social Conflict: State vs Civil Society (Case Study on Watu Ata nature reserve, Ngada District)' and thesis for magister public administration degree (MAP) entitled 'Marginalization Of Society: An Impact Of Government Policy (Impact Evaluation Study On Watu Ata Forest Establishment Policy As Nature Reserve Area).' He has been a presenter at a national seminar with the title of his paper 'Ri'i And Space Utilization, In Environmental Conservations And Increasing Welfare Of Community'

Budiarto, Judotens, is the Chief Technology Officer from Provetic Lab and Consulting in Jakarta, Indonesia. As the champion in technology, especially big data and cloud computing. He has many experiences in the area of a computer algorithm and online network. He is the central element in the Lab to move forward in understanding various online behaviors, especially in public response and politics.

Firdaus, Rindu Sanubari Mashita, got the Bachelor Degree of International Relation Science from Universitas Gadjah Mada and continued her concern about defense and security issue when she pursued Master Degree of National Resilience Science from the same university. The writer started her concern on political economy issue especially about economic democracy since she joints some volunteerism programmes in Center for Economic Democracy Studies, Universitas Gadjah Mada, in Sekolah Pasar Rakyat programme, to be precise. She continued her activity on that Center of Studies as a researcher and have been focusing on the nexus of economy and security, especially about the agrarian conflict.

Haryanti, Rina Herlina, is an active lecturer at the Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas Sebelas Maret. In addition to teaching, she is also an active researcher. Haryanti has a good interest in Public Policy, Developments Planning, Gender and People with Disability. Her newest research is on "Policy of Anti Bullying at Central Java" as one of the team members of a collaborative research between UNICEP, UNS, UNDIP, UNNES and UNWIDA. She has done several researchers in those topics and issues some publication. She has produced several writings in the form of Prosiding International Conference, Magazine and academic journals, among them are: People with Disability in Vocational High Schools: Between School and Work (2017); Community Governance and Vocational Education (2017); Diffabel, Social Movements And Digital Coonectivity: Study About Typology of Network Advocacy in Digital Spaces (2017); Labour Market for People With Disabilities: Exclusion or Inclusion (2017); Conventional VS Online Trnsportation: A Governance-Based Conflict Resolution (2017); Collaborative Governance Based Protection For HIV/AIDS (ADHA) Infected Kids in Surakarta (2017).

Indroyono, Puthut, is a researcher at the Centre for Economic Democracy Studies, Universitas Gadjah Mada. Most of his research topics are poverty alleviation, social entrepreneurship, cooperative, economic democracy, and so on. He was co-founder of "Sekolah Pasar", the education movement for the small-trader in traditional market. He has written many articles in mass media and journals. He has participated in the publication of books both as authors or editor, among them are: Autonomy of Villagers: Perceptions of Regional People and Villagers, FPPM, 2001; Kutai Barat Develops Economic Democracy (Mubyarto ed.), Aditya Media, 2003; Micro Finance in Kulonprogo, Aditya Media 2003; Development Strategy for Traditional Markets, LOS-DIY, 2012; School-Market: From People's Market Seize Sovereignty, Pustek-UGM, 2013; The Incubator of Democratic Model in Poor Village Around the Forest, Gama-Press, 2013; Development Strategy for Local and Retail Market in SR of Yogyakarta, LOS-DIY, 2016; Democratic Model in Renewable Energy, Gama-Press, 2016; "Green School": the Alternatif Model for Empowering the Villagers, Lakpesdam-NU, 2017.

Lestari, Puji, acquired her doctoral degree from Universitas Padjadjaran. She is currently active as a lecturer and researcher at Department of Communication Science, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. She led several research grants since 2008 and been actively published her research result in various journals. She has a wide variety interest on communication disaster, cross-cultural communication, marketing communications, and communication organization.

Muhamad, Roby, is the Chairman and Chief Scientist Officer from Provetic Lab and Consulting in Jakarta, Indonesia. He earned his Ph.D. degree from Columbia University, majoring in social networks. His research project in Columbia University has been published all over the world regarding testing the hypotheses of six-degree separation. Since he returned to Indonesia, he established Provetic Lab and Consulting along with his colleagues to provide movement in understanding online digital behavior or known as computational psychology.

Nugroho, Arif Rianto Budi, a bachelor's graduate of the Department of Geological Engineering, University of Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta acquired his Master in Remote Sensing & GIS from the Gadjah Mada University and he is currently a doctoral candidate at the Padjadjaran University. He is an active lecturer at Department of Geological Engineering, University of Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. In addition to teaching, he is also an active at Study Center for Disaster Research Education and Management.

Paripurno, Eko Teguh, is an active lecturer and coordinator at the Master Programme on Disaster Management, University of Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. Coordinator of Study Center for Disaster Research Education and Management and Head of University Forum for Disaster Risk Reduction (2015-2018). Over 25 years of working on Community based Disaster Risk Management (CBDRM), contributed directly to capacity building of more than 750 local CBDRM facilitators in 25 provinces in Indonesia since 1994. Laurette of Sasakawa Award for Disaster Risk Reduction from UNISDR (2009). He has produced and editor several writing of books: Community Based Disaster Management Risk Management Guidelines (2017, 2nd Ed.); Riset Partisipatif untuk Penanggulangan Bencana (2015, 2nd Ed.).

Santosa, Awan, is a lecturer in Faculty of Economy, Mercu Buana University, Yogyakarta and the Chief of LPPM. He was also co-founder of Sekolah Pasar (The School of Traditional Market), capacity building program for the merchants in the peoples market since 2012. He was also co-founder for Sekolah Buruh and Sekolah Koperasi Indonesia (Sekopia). He is now also one of experts in Center for Economic Democracy Studies, Universitas Gadjah Mada. He was also experts in KEMALA Consorciium and built Sekolah Hijau in 3 villages in Jambi and Southern Solok. With his colleagues, now is try to develop Sekolah Nelayan. He concerns on economic democracy and formulated Economic Democracy Index. He already researched and became a speaker on various regions in Indonesia about that issue.

Sjahputri, Smitha, is a socio-behavioral researcher from Provetic Lab and Consulting in Jakarta, Indonesia. She earned her Master Degree in social psychology from Faculty of Psychology, University of Indonesia in 2016. Her interest in research covers many areas in big data; cloud computing; online social networking in combination with politics and democracy in Indonesia. She has conducted many research and consultancy regarding public response and opinion from twitter; instagram and path.

Sua, Bertolomeus Loji, obtained a degree in political science in the field of International Relations at the Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (2013). He is currently pursuing a Master Degree from Department of Communication Studies at Sebelas Maret University Surakarta (UNS). His research interest includes social and political science, political communication and political policy.

Suyatna, Hempri, is a lecturer in Social Development and Welfare in Faculty of Social and Politics Science and also as researcher in Center for Economic Democracy Studies. He has several concerns such as economic democracy, SME's, people empowerment, and poverty alleviation. Some of his publication: Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan (2003), Quo Vadis Petani Indonesia, Terhempasnya Anak Bangsa Dari Sektor Pertanian (2006), Evo Morales Presiden Bolivia Menentang Arogansi Amerika (2007), Ekonomi Rakyat Dalam Pusaran Pasar Bebas (2009), Potret Kehidupan Pematik di Lasem

Rembang (2010), Strategi Perempuan Tangguh Bencana (2013), Memahami Model Bisnis Organisasi Sosial Di Indonesia (2015). He also frequently write in mass media especially about economic democracy issue.

Suharto, Didik G., is a lecturer at the Public Administration Magister Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University. He pursued his doctorate degree in Administrative Science in Brawijaya University. He is actively perform as speakers in various international and national conferences on local government, such as 'Public Service Quality of Village Government in Intergovernmental Relations Perspective' (The 4th International Conference on Public Management /ICPM, Yunnan-China, 2016); 'Local Policy in Coping with Rural Poverty' (The 1st International Conference on Dynamics and Empowerment of Rural Society in Asia, Semarang, 2016); 'The Implementation of Education Policy in Local Areas' (The 1st International Conference of Educational Sciences, Bandung, 2016); 'Food Tenacity Policy Supports Village Development' (The 4th International Conference on Social and Political Sciences, Solo, 2017); etc. He has produced several writings in the form of book and academic journals. The latest book and academic journal published in (2016) is 'Membangun Kemandirian Desa' and 'High Performance is Not Always Directly Proportional to Service Quality: in The Case of BPTPM Kabupaten Sragen 2016' (2017).

Wibowo, Istianto Ari, as researcher in Center for Economy Democracy Studies, Universitas Gadjah Mada. His concern is economic democracy in macro and micro. He is active in research, empowerment program, and frequently invited as speaker in discussion and seminar. Some of his publication are: Sekolah Pasar: Dari Pasar Rakyat Merebut Kedaulatan (2013); Pengembangan Model Inkubator Ekonomi Kerakyatan di Desa-desa Miskin Sekitar Hutan: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul DIY (2013); Model Kerakyatan Dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Kasus Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Desa Poncosari Kabupaten Bantul (2016).

Previous Issue

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 1, No. 1, Juli 1997

- Dwifungsi ABRI dan Demokratisasi: Menuju Penyeimbangan
- Menampung Partisipasi Politik Rakyat
- Industrialisasi dan Hubungan Perburuhan di Indonesia
- Tantangan Pers Nasional dalam Era Globalisasi
- Garda Terdepan Penjaja "Komoditi Budaya": Pemandu Wisata dan Biro Perjalanan dalam Industri Pariwisata
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Suatu Kebijakan
- Peranan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 1, No. 2, November 1997

- Dekonstruksi Wacana SARA Negara dan Implikasinya terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia
- Usaha Menghormati Keberadaan Khalayak Televisi Swasta
- *Paradoks* Demokrasi di Indonesia: Kerusakan pada Masa Kampanye Pemilu 1997
- Islam di Panggung Politik Indonesia: Latar Belakang, Dinamika, dan Pergeserannya
- (Tidak) Demokrasi Ala Asia
- Karakteristik dan Sumber Resiko dalam Era Modernisasi Refleksif

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 1, No. 3, Maret 1998

- Ilmu Sosial Modern: Perkembangan dan Tantangan
- Menelusuri Perdebatan mengenai Konsep Kekuasaan
- Federalisasi dan Demokratisasi Indonesia
- Sistem Federal dalam Negara Kesatuan (Kasus Pengaturan Desentralisasi-Otonomi)
- ABRI dan Demokratisasi di Indonesia
- Pers Negara Bertanggung
- Ilusi Virtual: Kejayaan Media atas Audien? Telaah Kritis atas Teori Resepsi Media Jean Baudrillard

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 2, No. 1, Juli 1998

- De-Soekarnoisasi dalam Wacana Resmi Orde Baru: Kilas Balik Praktik-praktik Rekayasa Kebenaran dan Wacana Sejarah oleh Rezim Orde Baru
- Komunitas Tarekat dan Politik Lokal di Era Orde Baru Penelitian di Kudus Jawa Tengah
- Model-model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di Yogyakarta
- Menempatkan Masyarakat pada Posisi Sentral dalam proses Pembangunan
- Reorientasi Pembinaan KUD
- Menyimak Kerancuan dalam Hubungan Lintas Kultur dan Struktur

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 2, No. 2, November 1998

- Rancangan Undang-Undang Politik Baru: Sebuah Tinjauan Kritis
- Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi
- Federasi dalam Masyarakat Internasional
- Birokrasi, Demokrasi dan Reformasi: Sudut Pandang Administrasi Negara
- Nasionalisme dan Strategi Pembangunan Nasionalis

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 2, No. 3, Maret 1999

- Komnas HAM dan HAM di Bawah Rezim Otoritarianisme
- Refleksi tentang Kekerasan Pembangunan: Menuju Pembangunan Perspektif HAM
- Peluang Represi sebagai Solusi Anarki
- Anarki sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi di Pedesaan
- Wacana Penjarahan dan Kekerasan Simbolik terhadap Petani

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 3, No. 1, Juli 1999

- Kecenderungan Politik Internasional Kontemporer
- Pembangunan Kekuatan Militer di Asia Pasifik Pasca Perang Dingin
- Dimensi Politik dalam Krisis Ekonomi Jepang
- Prospek berita Pemilu dalam Membentuk Memori Kolektif Khalayak
- Kemitraan Usaha sebagai Alternatif dalam Pembiayaan Sektor Publik di Daerah: Argumentasi Teoritis dan Kasus Kemitraan Pemerintah-Swasta di Pemda Cirebon dan Pemda Surakarta

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 3, No. 2, November 1999

- Strategi Pengembangan Masyarakat: Alternatif Pemikiran Reformatif
- Kemandirian Lokal: Upaya Pemberdayaan Hak-hak Sipil
- Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik ataukah Gerakan Moral?
- Masyarakat Madani: Visi Etis Islam tentang *Civil Society*
- Postmodernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi kebijakan

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 3, No. 3, Maret 2000

Kekerasan, Keberdayaan, dan Demokrasi

- Mencari Pola Baru Hubungan Negara-Rakyat
- Reformasi Politik, Demokrasi, dan Integrasi Nasional
- Antara Anarki dan Demokrasi: Masalah kekerasan Politik di Indonesia

- Penafsiran Sosiologis Pengamatan Konflik Januari-Mei 1999
- Kebudayaan Lokal dan Pemberdayaannya
- Privatisasi Komunikasi dan Demokrasi

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 4, No. 1, Juli 2000

Reformasi Kelembagaan Politik

- Pendekatan-Pendekatan dalam Studi Demokrasi di Asia Tenggara dan Relevansinya untuk Indonesia
- Reformasi Konstitusi dalam Transisi menuju Demokrasi
- Pemilihan Presiden dan Penciptaan Mekanisme 'Check and Balances': Menuju Penciptaan Sistem Presidensial Murni
- Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi
- Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru: Perubahan tanpa "Grand Design"
- Ketegangan Antara Individualitas dan Sosialita (Memahami Logika Pedagang Mojokuto)

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 4, No. 2, November 2000

Menggugat Kajian Media dan Kebebasan Pers

- Absennya Kajian Ekonomi Politik Media di Indonesia
- Ke Arah Studi "Etno-Media"
- Media Massa dan Globalisasi Produk Simbolik
- Media Pers dan negara: Keluar dari Hegemoni
- Relasi media-Negara-Masyarakat dan pasar dalam Era Reformasi
- Kebebasan Pers Pasca Orde Baru

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 4, No. 3, Maret 2001

Refleksi Nasionalisme Indonesia

- Memahami Kembali nasionalisme Indonesia
- Merajut Kohesi Nasional: Etno-Nasionalisme dan otonomi Daerah dalam proses Demokrasi
- Negara Bangsa dan Konflik Etnis: Nasionalisme vs Etno-Nasionalisme
- Intervensi Kebijakan Pasca (Dis)integrasi: Sebuah Pendekatan Resolusi Konflik
- Melacak Pemikiran Anthony Giddens tentang *Nation-State* dan Modernitas

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 5, No. 1, Juli 2001

Khasanah Gerakan Sosial

- Dimensi Politik Gerakan Perempuan: Suatu Survey
- Ritual "Amoek: Melayu: Rekonstruksi atas Ritus-ritus kekerasan di Indonesia
- Kejawaan dan Keislaman: Satu Pertarungan Identitas
- Dimensi Gerakan dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten
- Resistensi Wong Cilik atas Pasar (Alokasi-Konsumsi)
- Menyimak Relasi Kekuasaan dalam Kartun

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 5, No. 2, November 2001

Otonomi Lokal dan Keindonesiaan

- Otonomi Daerah dan Keindonesiaan
- Wakil Gubernur dan Keistimewaan DIY
- Fenomena "Rent Seeking" di Daerah: Kasus Tata Niaga Kayu Cendana
- Strategi Pemberdayaan Komunitas Lokal: Menuju Kemandirian Daerah
- Badan Perwakilan Desa: Harapan bagi Pembaharuan Desa
- Integrasi Nasional dan Hak Azasi Manusia

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 5, No. 3, Maret 2002

Kebijakan dan Manajemen Publik

- Dinamika Kebijakan Pangan Orde Baru: Otonomi negara vs Pasar Global
- Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif
- Keberpihakan dan Komunikasi dalam Kebijakan Perlindungan Buruh
- Problema dan Kebijakan Perumahan di Perkotaan
- Masalah Pertahanan: Redefinisi dan Agenda Aksi
- Penjajagan Awal Penerapan "New Public Management" dalam Administrasi Kabupaten
- 'Civil Society' di Indonesia: Suatu Tantangan

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 6, No. 1, Juli 2002

Kebijakan Publik: Perspektif Alternatif

- Penanggulangan Keiskinian: Kebijakan dalam Perspektif Gerakan Sosial
- "Policygraphy": Kerangka Analisis Proses Kebijakan dari Perspektif Non-Negara
- Makna Proses Kebijakan: Menyingkap Kontroversi Pembangunan 'Bali Nirwana Resort'
- Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal
- Peningkatan Daya Saing: Pendekatan Pradigmatik-Politik
- Pengembangan SDM Pariwisata Daerah: Agenda Kebijakan untuk Pembuat Kebijakan
- Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 6, No. 2, November 2002

Perkembangan dan Potret Ilmu Sosial

- *State of the Art* Ilmu Administrasi Negara
- Komunikasi: Akar Sejarah dan Buah Tradisi Keilmuan
- Memberi Perspektif pada Ilmu Komunikasi
- Bahasa atau Komunikasi: Mengkritisi "Metode- Penelitian bahasa"
- Kajian Budaya Kontemporer

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 6, No. 3, Maret 2003**

Dinamika Negara dan Masyarakat Sipil

- Oposisi Berseragam: catatan tentang Hubungan Politik Suharto dan Militer di akhir 1980-an
- Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia
- *'Good Governance'*, Daya Saing dan Investasi Global
- Gerakan Petani dalam konteks masyarakat sipil Indonesia: Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Tani Merdeka (SeTAM)
- *'Civil Society'*: Anatomi perkembangan Perkumpulan Warga di Era Otonomi

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 7, No. 1, Juli 2003**

Neoliberalisme: Refleksi Kritis

- Dilema Praktis Globalisme Neoliberal
- Kapitalisme Indonesia: Dalam Jerat Jaring Neoliberalisme
- Media Massa: Dalam Jerat Jaring Neoliberalisme
- Komodifikasi Perempuan: Tapak Ekonomi Neoliberal
- Liberalisme di Inggris, 1970-1990

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 7, No. 2, November 2003**

Globalisasi: Antara Negara dan Pasar

- Globalisasi dan Kemiskinan
- Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan Global: Prioritas Keadilan dan Pentingnya Integrasi Ilmu Pengetahuan
- *Developmental State* dan Tantangan Globalisasi: Pengalaman Korea Selatan
- *NGO, Civil Society* dan Demokrasi: Kritik atas Pandangan Liberal
- Etika Jurnalisme Televisi di tengah Disorientasi Negara dan Pasar
- Multikulturalisme sebagai Identitas Kolektif, kebijakan Politik dan Realitas Sosial
- Teori Negara Marxis

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 7, No. 3, Maret 2004**

Peran dan Konstruksi Sosial tentang Perempuan

- Gerakan Perempuan di Indonesia Masa ke Masa
- Potret Kuota Perempuan di Parlemen
- Potret Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan Publik di Era otonomi Daerah
- Ketidakadilan Konstruksi perempuan di Film dan Televisi
- Peningkatan Kepekaan Gender dalam Jurnalisme
- Tantangan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pers di Indonesia
- Perempuan dalam Dunia *Public Relations*
- Pencitraan kekerasan Saddam Hussein terhadap Perempuan sebagai Propaganda Amerika Serikat

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 8, No. 1, Juli 2004**

Representasi dan Keberpihakan dalam Media

- Film Propaganda: Ikonografi Kekuasaan
- Representasi Maskulinitas dalam Iklan

- Terorisme dan Media Massa: debat Keterlibatan Media
- Interaksi Politik dan Media: dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi
- Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media dalam Pemilu 2004
- Kinerja TV Publik: Analisis Isi Berita TVRI tentang Kampanye Pemilu Legislatif 2004

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 8, No. 2, November 2004**

Tinjauan Kritis Globalisasi

- Mencari Badan Publik: Refleksi bagi Rehabilitasi Arti *'Pembangunan'*
- Gerakan Anti Kapitalisme Global
- Globalisasi, Liberalisasi Ekoonomi dan Krisis Demokrasi
- Globalisasi dan Diaspora Cina dalam Perspektif Post-Kolonial: Dinamika Strategi Ekonomi dan Identitas Budaya
- *Global Governance* sebagai Agenda penelitian dalam Studi hubungan Internasional
- Mobilitas Pekerja, Remitan dna Peluang Berusaha di Pedesaan

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 8, No. 3, Maret 2005***Democratic Governance*

- *'Good Governance'* dan *'Governability'*
- Globalisasi, *'Global Governance'*, dan Prospek *'Governance'* di Dunia Ketiga
- Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan yang Demokratis
- HAM di Indonesia: Menuju *'Democratic Governance'*
- *'Governance'* sebagai Pengelolaan Konflik
- Kebijakan Publik dan Praksis *'Democratic Governance'* di Sektor Pariwisata

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 9, No. 1, Juli 2005**

Demokrasi: Problema dan Manfaatnya

- *Civil Society*: Pembangunan dan Sekaligus Perusak Demokrasi
- Reformasi Administrasi dan Paradoks Demokrasi
- Reformasi Sektor Keamanan Demi Demokrasi Penanganan Terorisme di Indonesia
- Terorisme dan Demokrasi: Masalah Global, Solusi Lokal
- Hegemoni Amerika Pasca 11/9: Menuju Sebuah *'Imperium Amerika Baru'*?
- Jurnalisme dalam Tatanan Neoliberal dan Krisis Demokrasi

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 9, No. 2, November 2005**

Potret Ilmu-Ilmu Sosial

- Peran Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora bagi Liberasi dan Humanisasi Teknologi
- Membebaskan Ilmu Sosial dari Keterperangkapan Ganda

- Jurusan Ilmu Sosiatri: "Hidup" Tak Banyak orang tahu, "Mati" jangan Dulu
- Kajian Historis dan Isu-Isu Kontemporer untuk Merumuskan Agenda Masa Depan Ilmu Administrasi Publik
- Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan
- Komunikasi: Cermatan Perkembangan

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 9, No. 3 Maret 2006

Tarik Menarik Kepentingan dalam Media Massa

- Pemberitaan Media Pers Indonesia
- Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman
- Kisah Kelabu di balik Maraknya Pers Lokal di Kalimantan
- Sikap Politik Pemerintah dalam Perwacanaan Musik Populer tahun 80-an dan 90-an
- Problem Lokalitas dalam Bisnis Radio Network
- 'New Media' dan Demokrasi: Menimbang Peluang

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 10, No. 1, Juli 2006

Pemberdayaan Masyarakat

- Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani
- Petani Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Pengembangan Komunitas
- Persoalan Pengembangan Institusi Pemberdayaan Masyarakat
- Investasi Pendidikan sebagai Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 10, No. 2, November 2006

Respon terhadap Tantangan Internasional

- Konsep Legalisasi dalam Politik Kerjasama Internasional
- Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik
- Nasionalisme dan Negara Bangsa
- Pendekatan Kultural sebagai Strategi Resolusi Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand
- WTO, Negara sedang Berkembang dan Gerakan Masyarakat Sipil Global

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 10, No. 3, Maret 2007

Kebijakan Sosial Politik

- Marjinalisasi Petani atas Nama Pemberdayaan: Problematika Mengubah Paradigma Kebijakan
- Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani
- Mengkaji Potensi UKM untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia
- Potret Buram Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- Kepedulian Sosial Perusahaan: Cermin Disfungsi Pluralisme Kesejahteraan
- Dinamika Pelaksanaan Desentralisasi Birokrasi Pelayanan Kesehatan
- Amandemen Konstitusi untuk Mengelola Kebhinekaan Indonesia

- Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 11, No. 1, Juli 2007

Demokrasi Mencari Bentuk

- Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoretik
- Islam, Demokrasi, HAM: Sebuah Bentuan Filosofis dan Teologis
- Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi
- Dilema para Politisi di Tingkat Lokal: Antara Mimpi, Inovasi dan Demokrasi
- Antagonisme Sosial, Dekonsensus, dan Rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agonistik
- *Explaining the Emergency and the Durability of the Right Wing Parties: The Case of The Italian Second Republic*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 11, No. 2, November 2007

Dinamika Politik Lingkungan

- Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia
- Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan: Membaca Papua melalui Pendekatan *Environmental Security*
- Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan: Upaya Mencari Jalan Tengah
- Hutan Rakyat dan Serbuan Pasar: Studi Refleksi Pengusahaan Hutan Rakyat Lestari secara Kolaboratif di Pacitan
- Kerusakan Ekologis Hutan Jati di Kabupaten Muna (Potret Pemujaan Pendekatan Anthroposentri)
- Banjir Jakarta 2007: Kegagalan Kolektif Pengelolaan Bumi
- Menggugah Partisipasi & membangun Sinergi: Upaya Bergerak dari Stagnasi Ekologis Pengelolaan Sampah

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 11, No. 3, Maret 2008

Komunikasi Bencana

- Bencana, Informasi dan Keterlibatan Media
- Kecenderungan "Framing" Media Massa Indonesia dalam Meliput Bencana sebagai *Media Event*
- Wajah Spanduk Solidaritas Gempa Yogyakarta: Tinjauan dari Perspektif Komunikasi
- Literasi Media dan Interpretasi atas Bencana
- Memberdayakan Masyarakat Lewat Penyiaran Berita Bencana Alam

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 12, No. 1, Juli 2008

Gerakan Sosial

- Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat: Masyarakat Kuat, Negara Kuat, Mengapa Tidak?
- Wajah Prakarsa Partisipatif: Dinamika Gagasan Reforma Agraria dan gerakan Sosial di Indonesia Pasca 1998

- Tatkala Kampung Kota Bicara Konflik-Harmonisasi
- Polling sebagai Ekspresi Opini Publik, Pilar Kelima Demokrasi?
- Memerkarakan Identitas Nasional: Representasi Identitas Kultural dalam Sinema Generasi baru Indonesia dan Malaysia
- Konvergensi Media Periklanan dalam Konstelasi Perkembangan Teknologi Media

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Volume 12, No. 2, November 2008

Media dan Demokrasi

- Konsentrasi Kepemilikan Media dan Ancaman
- Paradoks Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi
- Ketika Watchdog Dipelihara Para Juragan: Kontrol Pengusaha terhadap Media Massa
- Polling sebagai Ekspresi Opini Publik, Pilar Kelima Demokrasi?
- Memerkarakan Identitas Nasional: Representasi Identitas Kultural dalam Sinema Generasi Baru Indonesia dan Malaysia
- Konvergensi Media Periklanan dalam Konstelasi Perkembangan Teknologi Media

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Volume 12, No. 3, Maret 2009

Parpol dan Pemilu

- Demokrasi Biaya Tinggi: Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru
- Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Prespektif
- Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan
- Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia
- *Parliamentary, Presidential, and Semi-presidential Systems of Government: Representation or Policy-making Effectiveness?*
- Kajian Epistemologis Iklan Politik dan Perilaku Memilih dalam Dinamika Pemilu 2009

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Volume 13, No. 1, Juli 2009

Konflik dan Perdamaian

- Kekerasan atas Nama Agama: Perspektif Politik
- *Journey to Zero Violence: An Experience of Youth-Based Civil Society Organization in Eradicating Violent Practices in The School Initiation Programme*
- Lingkungan dan Pembangunan Perdamaian: Refleksi kasus Aceh
- Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca Konflik
- Manakala Konflik Berkepanjangan harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek, Jember
- *Middle Class Chinese Indonesians in Solo: In Search of New Identity in Post-Suharto's New Order*
- Keamanan maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Volume 13, No. 2, November 2009

Demokrasi dan Transformasi Institusi Tradisional

- Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik
- *State Neglect, Church Decline, and Ascendent Adat: The Power Contestation in Adonara, Eastern Flores*
- Peran Negara dalam Menciptakan Perdamaian: Kasus Pilkada Langsung di Kab. Gianyar dan Kab. Buleleng Provinsi Bali
- *Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institution n Democratic Transition*
- Komunitas Berpagar: antara Inovasi Sosial dan Ketegangan Sosial (Studi Kasus Komunitas Berpagar di DIY)
- Dinamika Sistem Kesejahteraan dan Modal Sosial di Masyarakat Banjar Pakraman-Bali

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Volume 13, No. 3, Maret 2010

Dinamika Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- Jaminan Sosial Berbasis Komunitas: Respon atas Kegagalan Negara dalam Penyediaan Jaminan Kesejahteraan
- Pengarusutamaan Lansia dalam Pelayanan Sosial
- *Social Habitus of Domestic Workers Family: The Influence of Remittance to Domestic Workers Family*
- SDM dan Modal Sosial dalam Jaringan Bisnis Komunitas Tarekat di Yogyakarta
- Strategi Penciptaan Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Kemudahan Akses Penduduk Desa Miskin
- Reorientasi Kebijakan UMKM di Era Asia *China Free Trade Area* (ACFTA)

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Volume 14, No. 1, Juli 2010

Multikulturalisme dan Pergulatan Identitas

- *Discourse Subaltern* dalam Masyarakat Interkultural: Mencermati Relasi Gender
- Masyarakat Warga dan Problem Keberadaban
- Resistensi Kelompok minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia
- Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa
- Dinamika Kekuasaan dalam Komunitas Jazz Yogyakarta 2002-2010
- *Managing Political Information: A Malaysian Perspective*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Volume 14, No. 2, November 2010

Membedah Radikalisme di Indonesia

- Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia
- Melacak akar Radikalisme Islam di Indonesia
- Radikalisasi Pluralisme sebagai usaha Pengarusutamaan Politik Agonistik
- Probabilitas Teroris Perempuan di Indonesia
- Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi
- *Reorientalizing Islam: Terrorism and Discourse on Evil*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 14, No. 3, Maret 2011

Membingkai Peran Politik Media

- *How Smart Can We Go? The Quality of Campaign Information in The 2009 Presidential Election*
- Menuntut Kelengkapan Peran Media: Tidak Hanya membawa tetapi juga Membongkar Pencitraan
- Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah
- *Democratic Governance* dan HAM: Makna Kebebasan Pers dalam Otonomi Daerah
- Dilema Peliputan Terorisme dan Pergeseran Pola *Framing* Berita Terorisme di Media Massa
- Etika: keamanan Berpolitik dan Ber-*New Media*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 15, No. 1, Juli 2011

Kebijakan Sosial di Aras Lokal

- Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan
- Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Pemecahan Masalah Sosial
- Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif
- Revitalisasi Model Penanganan Anak jalanan di Rumah Singgah
- Pengetahuan Ekologi Tradisional Masyarakat Orang Asli Jakun dalam Menilai Ekosistem Servis di Tasik Chini, Malaysia
- Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik di SAMSAT Kota Yogyakarta
- *The Two Edge Knife of Decentralization*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 15, No. 2, November 2011

Dilema Tata Kelola Pemerintahan

- Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi dan Revitalisasi kelembagaan Demokrasi
- *Governance and New Mode of Governing: Indonesia as a Metaphor*
- Pembentukan Struktur Negosiasi Kota Surakarta: Kritik Nalar 'Best Practices' dalam Penyelenggaraan Pemerintah
- 'Komin Tipu Komin': Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua
- *Tolerance of Minorities and Cultural Legitimacy: The Case of Pesantren Khusus Waria Al-Fattah Senin-Kamis Yogyakarta*
- Redefinisi "Perbatasan dan Keamanan" di Asia Tenggara: Sebuah Paradigma untuk Ketahanan nasional)
- Praktik Jurnalisme Lingkungan oleh Harian Jawa Pos

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 15, No. 3, Maret 2012

Dinamika Politik Desentralisasi

- *Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview of Ten Years Democracy*
- *The Paradox of Distance in Decentralized Indonesia*
- Desentralisasi dan Sumber Daya Aparatur: Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian

Cagar Budaya di Provinsi Sumatra barat, Riau, dan Kepulauan Riau

- Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
- *Humanitarianism and Disaster Governance in Indonesia: Case Study Merapi Eruption in 2010*
- Strukturisasi Norma: Pengarusutamaan gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di Negara Pasca-Kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia)

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 16, No. 1, Juli 2012

Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

- Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia
- Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- Sengketa Perebutan Divestasi saham Newmont Nusa Tenggara: analisis Ekonomi Politik 2008-2012
- Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia Pasca 1998
- Pembangunan Berbasis Waterfront dan Transformasi konflik di Bantaran Sungai: Sebuah Pemikiran Awal
- *Does The Pressure of Population and Poverty Cause Deforestation?*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 16, No. 2, November 2012

Mengelola Perbatasan Negara

- Problem Diplomasi Perbatasan dalam tata kelola perbatasan Indonesia-Malaysia
- Rezim Persahabatan ASEAN dalam Tata Kelola Lintas Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia berbasis *Connectivity*
- Penguatan Human Security sebagai Strategi Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Malaysia
- Keamanan Energi dan Hubungan Kerjasama Cina-Jepang
- Signifikansi Desentralisasi Kehutanan bagi Implementasi REDD+ di Kabupaten Maluku Tengah
- Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 16, No. 3, Maret 2013

Gerakan Sosial (Baru) Pasca "Orde Baru"

- PKBI: Aktor *Intermediary* dan Gerakan Sosial Baru
- Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel
- Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan: Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat (Kasus Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung)
- Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia
- *Optimising Community-Based Forest Management Policy in Indonesia: A Critical Review*
- Berlandung dalam HAM: Strategi Pekerja Seks di Eropa untuk Mentransformasi Kebijakan Prostitusi

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 17, No. 1, Juli 2013**

Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia

- Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia Periode 2007-2012
- Etnisitas sebagai Instrumen Politik dan Keamanan di Kalimantan Barat Pasca Rezim Orde Baru
- Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia
- Membongkar *Veto Player* dalam Politik Kepartaian Indonesia menuju Pemilu 2014
- Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012
- Mereformasi Birokrasi dari Perspektif Sosio-Kultural: Inspirasi dari Kota Yogyakarta

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 17, No. 2, November 2013**

- Kemandegan CSR dan Kontribusinya terhadap Perluasan Konflik Agraria di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji
- Penerapan CSR pada Media Sosial: Studi Kasus Program CSR "Klik Hati" PT Merck Indonesia
- Manajemen Konflik Berbasis Komunitas: Studi Kasus *Community Oriented Policing* di Malioboro Yogyakarta
- Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo
- Karst: Ditambang atau Dilestarikan: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah
- Tanggung Jawab Sosial Korporasi dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat
- Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pengaruh Wanita Kepala Rumah tangga

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 17, No. 3, Maret 2014**

- Model Literasi Media Berbasis Kearifan Lokal pada Suku Dayak Tunjung dan Dayak Benuaq di Kutai Barat
- Sistem Klasifikasi dalam Pemutaran Film: Studi Kasus Klasifikasi Film di Kinoki
- Mitos Genjer-genjer: Politik Makna dalam Lagu
- Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Thailand terhadap Pasar Timur Tengah
- Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekadar Upah: Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi
- Kebangkitan *Party ID*: Analisis Perilaku Pemilih dalam Politik Lokal di Indonesia

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 18, No. 1, Juli 2014**

- Kepengaturan dan Penolakan Relokasi: Kasus Warga Watugajah Pascabencana Gunung Merapi tahun 2011-2013
- Analisis Kepemimpinan Partisipatif dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Selfie dan Media Sosial pada Seni sebagai Wujud Eksistensi

- Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya
- Urbanisasi di Kota Balikpapan: Formasi Sosial Keluarga Pendatang Miskin
- Kewargaan Inklusif sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 18, No. 2, November 2014**

- *Indonesian Human Resources Readiness in term of Facing the ASEAN Economic Community*
- Nahdlatul Ulama: Bebas untuk Oportunis? Menelisis Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2008 dan 2013
- Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena "Arab Spring" dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional
- Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014
- Jejak Perempuan Buruh Migran dalam Masyarakat ASEAN 2015
- Polisi Syariah: Keamanan untuk Siapa?

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 18, No. 3, Maret 2015**

- Inovasi Bupati di Ruang Demokrasi: Upaya Membangun Kesadaran Inovasi Birokrasi
- Pers Mengawal Demokrasi Daerah: Analisis Pemberitaan Implementasi dana Keistimewaan di Harian Tribun Jogja
- Disorientasi Politik dan Peran *Intermediary* Kelas To Pulo: Politik Lokal di Kepulauan Selayar Pasca Orde baru
- Konflik Internasional Abad ke-21? Benturan Antarnegara Demokrasi dan Masa Depan Politik Dunia
- Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut taman Nasional Bali Barat
- *Studi Ecological Fiscal Transfer* sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**Volume 19, No. 1, Juli 2015**

- Kontestasi Kekuasaan dan Keteladanan Semu di Indonesia
- Kampanye Kreatif dalam Kontestasi Presidensial 2014
- Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta
- Meneropong Kominda dari Perspektif Desentralisasi: Sebuah Diskusi tentang Posisi Intelijen Daerah dalam Logika Desentralisasi
- Analisis Keberlanjutan dan Pola Pengembangan *Co-Operative Entrepreneurship* Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)
- Kodifikasi dan Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca pada Industri Semen baja dan Pulp

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 19, No. 2, November 2015

- *Communal Conflict in Indonesia: Contagious or Latent Issues?*
- *Security Complex* antara Indonesia dan Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara
- Intervensi Penyelenggaraan Pemilu: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi
- Melayu di Atas Tiga Bendera: Konstruksi Identitas Nasionalisme Masyarakat Perbatasan di Kepulauan Batam
- Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus Korupsi P2SEM di Provinsi Jawa Timur)
- Implementasi Kebijakan Silvopastur di Cagar Alam Gunung Mutis dan Perlawanan Masyarakat Lokal

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 19, No. 3, Maret 2016

- Krisis Kapitalisme 2008 dan Bangkitnya Gerakan Kiri: Studi Dinamika Gerakan Partai Syriza di Yunani
- Memaknai Ulang *Corporate Social Responsibility*: Upaya Mewujudkan *Fair Responsibility*
- Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka
- Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015
- Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kinerja Kantor Pertanahan Rote Ndao

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 20, No. 1, Juli 2016

- *Electoral System and Party Dimension Assessment in Democratic Indonesia*
- *Why Political Parties Colonize the Media in Indonesia: An Exploration of Mediatization*
- *Interdependence versus Truth and Justice: Lessons from Reconciliation Processes in Maluku*
- Menakar Peran Relawan Politik Pasca Kontestasi Presidensial 2014
- Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream
- Studi Eksploratif Mengenai Yogyakarta sebagai Pengirim Wisatawan Keluarga

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 20, No. 2, November 2016

- Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016
- *Sustainable Administrative Reform Movements Policy in Joko Widodo's Administration*
- Komparasi Efektivitas dan Model *Governance* Inkubator Bisnis Digital antara Pengelola Pemerintah, BUMN, Swasta, Komunitas, dan Universitas

- *Aktivisme Kelas Menengah Berbasis Media Sosial: Munculnya Relawan dalam Pemilu 2014*
- *Towards Research University through Ambidexterity Practice: A Lecturer Perspective*
- Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 20, Issue 3, March 2017

- *Complexity and Adaptive System of Television Broadcasting: The Reflection of Autopoietic Mechanism of Indonesian Television Broadcasting System*
- *The Influence of Politicians on Television Content in Post-Authoritarian Indonesia*
- *Independent Candidates in the Concurrent Regional Election in South Sulawesi: What is Independent and Why?*
- *Potential Conflict Among ASEAN Member States in The Implementation of The ASEAN Economic Community*
- *The Long Road to Partnership: Conflict Resolution of Register 45 Mesuji Lampung*
- *Language as a Status Symbol of Power in Social Interactions at a Multicultural School in Medan*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 21, Issue 1, July 2017

- *Public Trust and Regulatory Compliance*
- *Media and Politics: Re-Thinking the Indonesian Broadcasting System*
- *Exploring the Terrains of Indonesian Cultural Policy: Learning from Singapore's and Malaysia's Experiences*
- *Participation Dynamics of Voters Using ID Card in Local Elections: A Case Study of the 2015 Local Elections in South Sulawesi*
- *Power Network of Penghulu Adat in the Concurrent Regional Election in West Sumatera*
- *Piil Pasenggiri: A Concept of Political Power in Lampung Culture*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 21, Issue 2, November 2017

- *Governing Alternative Resources for Social Policy: A Welfare Political Challenges on Mixed-Welfare Arrangements*
- *A Conceptual Framework in the Formation of Young Entrepreneurs in Indonesia*
- *The Study of Government's Role for Welfaring Rubber Farmer in The Globalization Vortex*
- *Special Economic Zone at the Crossroad: The Case of Batam*
- *The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land*
- *Gaukang and White Coup: Dismantling of Traditional Power*

AUTHOR GUIDELINES FOR JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (JSP)

1. The manuscript is written in English, including research outcomes, field research or literary research and articles reflecting sociopolitical phenomena.
2. The manuscript is typed using Microsoft Word program on A4 paper, around 6,000-7,000 words in Palatino Linotype size 11 pts and 1.5 space.
3. The writing system for research outcome consists of:
 - a. Title
The title should not exceed 14 words; it should be clear, concise, and informative. Abbreviations should be avoided.
 - b. Name of the author
The name of the author is written **without** any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by a team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or email.
 - c. Abstract with keywords
The abstract and keywords must be written in English. The length of each abstract is around 200-250 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, methods, and result of the research.
 - d. Introduction
The introduction should contain (sequentially) the general background and research question or hypothesis. The study objective should be written at the end of the introduction.
 - e. Methods
The research methods should elaborate on the method utilized in addressing the issues including the method of analysis. It should contain enough details allowing the reader to evaluate the appropriateness of methods as well as the reliability and validity of findings.
 - f. Results
The author should explain the results of research (what was discovered) in detail. If there is literature review, it can be included in this chapter.
 - g. Discussion
The research result and discussion section contain results of the research finding and their ensuing discussions. The finding acquired from the results of the conducted research should be written with the supplementary support of adequate data. The research results and findings should be able to resolve or provide explanations to the question stated in the introduction.
 - h. Conclusion
The concluding statement should contain summary and suggestion. The summary should exemplify the answers provided to the hypothesis and/or research objectives or acquired findings. The summary should not contain repetition of research results and discussions, and it should instead contain a summation of research results and findings as expected in the research objective or hypothesis. The suggestions should present matters that will subsequently be conducted in relation to the research's ensuing concepts.
 - i. References
All references cited in the text of the article should be written in the bibliography section. It should include references obtained from primary sources (consisting of scientific journals

amounting to 80% of the entire bibliography) that have been published in the last 10 (ten) years. The remaining 20% may include research articles or research reports (thesis, books, and other relevant publications).

4. The manuscript is to be submitted directly to the www.jurnal.ugm.ac.id/jsp by creating user account as an author.
5. Tables and figures must have titles and have clear number and sources, and be typed in single space. The images, tables, charts or diagrams listed should be in black and white format.
6. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% literature published in the last ten years. The reference sources in the form of research articles in a journal or a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications). Articles published in JSP are recommended to be used as reference.
7. All reference mentioned should be written down in reference using American Psychological Association (APA) style and arranged from A to Z.
8. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.

Books

Anderson, B. (1983). *Imagined communities*. London: Verso.

Book chapter

Smith, F. M., & Jones, W. (2004). The college student. In C. Wood & M. Meyer (Eds.), *Cross-cultural education* (pp. 75-105). London, Canada: MacMillan.

Journal article

Lee, K. (2004). Reading and learning strategies: recommendations for the 21st century. *Journal of Developmental Education*, 28(2), 2-15.

Journal article with DOI

Kusumaningrum, D. (2016). Interdependence versus truth and justice: lessons from reconciliation processes in Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 15. doi: 10.22146/jsp.17998

Smith, G. (2012). Barthes on Jamie: myth and the tv revolutionary. *Journal of Media Practice*, 13, 3-17. doi: 10.1386/jmpr.13.1.3_1

Journal article on website

Austin, D. (2009). Fatty acids, breastfeeding and autism spectrum disorder. *E-journal of Applied Psychology*, 5(1), 49-52. Retrieved from <http://ojs/lib.swin.edu.au/>

Newspapers article

Fung, M. (2006, December 12). Asthma rates are increasing. *Winnipeg Free Press*, pp. C4.

Newspaper article on website

Harris, M. (2011, August 16). Grades improve if classes start later, studies find. *The Calgary Herald*. Retrieved from <http://www.calgaryherald.com/>

Website

Buzan, T. (2007). Mind maps. Retrieved September 3, 2009, from http://www.buzanworld.com/Mind_Maps.htm

Website document

TransCanada. (2006). *Annual report*. Retrieved from http://www.transcanada.com/investor/annual_reports/2006/media/pdf/TransCanada_2006_Annual_Report.pdf

Book translation

Mancusa, S., & Viola, A. (2015). *Brilliant green: The surprising history and science of plant intelligence* (J. Benham, Trans.). Washington, DC: Island Press.

9. All manuscripts are anonymously studied by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.
10. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
11. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.
12. Author whose manuscript is published will get a copy of publishing proof and five copies of printing proof. Unpublished manuscripts will not be returned.



JSP

JURNAL ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK



Editorial Office :
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Gadjah Mada
Sosio Yustisia Street, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Phone : (0274) 563362 ext. 154
Website : jurnal.ugm.ac.id/jsp
Email : jurnalsopol@ugm.ac.id

ISSN 1410-4946 (Print)



1410-4947

ISSN 2502-7883 (Online)



9 772502 788007